



CAHAYA DI UFUK TIMUR

PERJALANAN TRANSFORMASI PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

ANGKATAN KESATU TAHUN PERTAMA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
TAHUN 2023

CAHAYA DI UFUK TIMUR

PERJALANAN TRANSFORMASI
PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK
ANGKATAN KESATU TAHUN PERTAMA
TAHUN 2023

Cahaya di Ufuk Timur :

Perjalanan Transformasi Program Sekolah Penggerak Angkatan Kesatu Tahun Pertama

Pengarah	Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Penanggung Jawab	Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Pengarah Konten	Katman
Peninjau	Feddy Djunaidi, Saut Maria Simatupang, Winner Jihad Akbar
Penyunting Ahli	Poppy Dewi Puspitawati
Penulis	Billy Antoro & M. Adib Minanurokhim
Tim Data	Yusuf Rokhmat, M. Roland, Djoko Stio, Wahyudi, Yusuf Andrian, Meike Anastasia
Penyunting Bahasa	Rahmadiyanti Rusdi
Penata Letak	Rahadian Adhi
Cetakan I	2023
Diterbitkan Oleh	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kompleks Kemendikbud, Gedung E Lantai 14 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Cahaya di Ufuk Timur: Perjalanan Transformasi Program Sekolah Penggerak Angkatan Kesatu Tahun Pertama/ Billy Antoro, Adib Minanurokhim; Penyunting Ahli: Poppy Dewi Puspitawati; Penyunting: Rahmadiyanti Rusdi.
Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, 2022. xi+ 133 hlm; 17,6 x 25 cm

Buku ini bebas diperbanyak dan diterjemahkan baik sebagian maupun keseluruhannya, tetapi tidak dapat diperjualbelikan maupun digunakan untuk tujuan komersil.



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

BUKU CAHAYA DI UFUK TIMUR

Dalam upaya melahirkan generasi Pelajar Pancasila, kita membutuhkan sumber daya berkualitas yang mampu merancang model pembelajaran yang berpusat pada murid. Kita membutuhkan para guru dan kepala sekolah yang memiliki *growth mindset* atau pola pikir yang selalu berkembang, dan mampu terus beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan para pelajar kita hari ini.

Pada Februari 2021, kami meluncurkan Sekolah Penggerak sebagai salah satu rangkaian dari gerakan Merdeka Belajar. Melalui program ini, kita berupaya mentransformasi berbagai aspek esensial dalam ekosistem pembelajaran di sekolah, antara lain mengupayakan penguatan SDM, sekolah menghadirkan pembelajaran dengan paradigma baru, perencanaan berbasis data, digitalisasi sekolah, serta penguatan kolaborasi antara Kemendikbudristek, pemerintah daerah, dan sekolah.

Berkat kerja keras dan kerja sama banyak pihak, Program Sekolah Penggerak saat ini telah diimplementasikan secara masif dan memberikan dampak nyata pada peningkatan kualitas dunia pendidikan. Sampai saat ini, telah ada lebih dari 15.000 Sekolah Penggerak yang tersebar di seluruh Indonesia. Sekolah-sekolah ini tidak hanya mampu mengembangkan pembelajaran secara holistik dan meningkatkan kualitas lingkungan sekolahnya, namun juga mampu memberikan pengaruh positif kepada sekolah lain di lingkungan sekitarnya.



Kehadiran buku *Cahaya di Ufuk Timur* yang merekam perjalanan Sekolah Penggerak angkatan pertama ini merupakan salah satu upaya untuk memperluas dan memperkuat implementasi Sekolah Penggerak. Selain mendokumentasikan berbagai praktik baik pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, dalam buku ini kita juga bisa ikut merasakan perjuangan, proses panjang, dan semangat para kepala sekolah yang berkeinginan tinggi melakukan transformasi di sekolahnya masing-masing.

Ke depannya saya berharap ada lebih banyak lagi upaya yang kita lakukan untuk menyebarkan praktik baik dan dampak nyata dari Program Sekolah Penggerak dan gerakan Merdeka Belajar. Mari bersama-sama kita terus bergerak serentak mewujudkan Merdeka Belajar demi lahirnya generasi unggul para Pelajar Pancasila.

Jakarta, Juni 2023

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

ttd

Nadiem Anwar Makarim

KATA PENGANTAR

Dalam kesejarahan pendidikan di Indonesia, masa jabatan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim termasuk masa pelik dan getir, karena dunia dilanda Pandemi Covid-19 selama kurang lebih dua tahun. Pergerakan cepat virus ini telah memporak-porandakan tatanan dunia, membuat perubahan besar-besaran dalam cara manusia berinteraksi, membuat lamban pergerakan perekonomian, tidak terkecuali mengubah cara pandang kita untuk menghadapi proses pendidikan di masa depan.

Pandemi telah menyebabkan pemerintah di berbagai belahan dunia menutup sekolah secara besar-besaran dan melakukan pembelajaran secara daring, sebagai upaya menghindari para murid dari dampak Covid-19, termasuk strategi untuk memutus mata rantai persebaran virus. Namun pembelajaran secara daring, bagi Indonesia yang belum pernah menerapkan sebelumnya tentu mempunyai konsekuensi, yaitu menurunnya kemampuan murid pada pembelajaran (*learning loss*). Tentu persoalan ini memperparah krisis pembelajaran (*learning crisis*) yang sebelumnya ada dan sudah berlangsung lama di Indonesia.

Jadilah, Kemendikbudristek mempunyai beban berlipat. Satu persoalan masih mengadang sementara persoalan baru datang menimpa. Namun, sebagaimana keinginan besar menghadirkan transformasi pendidikan, Kemendikbudristek tidak habis akal. Perlu strategi matang dan komprehensif agar "persoalan lama dan baru" teratasi seiring-sejalan. Melalui rangkaian episode Merdeka Belajar, dengan membawa semangat gotong royong, Kemendikbudristek menemukan formula penting untuk menyelesaikan *learning crisis* dan *learning loss* secara beriringan. Salah satunya melalui Program Sekolah Penggerak (PSP) yang diluncurkan pada 1 Februari 2021.





Buku ini disusun tentu saja bukan untuk menjelaskan secara menyeluruh strategi Kemendikbudristek dalam menjawab tantangan dunia pendidikan melalui PSP. Buku ini berupaya untuk memotret pelaksanaan PSP angkatan ke-1 tahun pertama. Sederhana memang, tapi kami yakin buku ini akan berdampak dalam proses evaluasi pelaksanaan PSP ke depan. Dalam buku ini dihadirkan praktik-praktik baik dan kisah para pelaku perubahan. Tentu kami berharap cerita mengenai pelaksanaan PSP di dalam buku ini dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan PSP selanjutnya. Semoga beragam manfaat dapat diterima ketika membaca buku ini.

Jakarta, Mei 2023
Direktur Jenderal PAUD,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

ttd

Dr. Iwan Syahril, S.IP., M.A., Ed.M., Ph.D.



DAFTAR ISI

SAMBUTAN / I
KATA PENGANTAR / III
DAFTAR ISI / V

I

TRANSFORMASI PENDIDIKAN

<i>Learning Loss</i>	02
<i>Kompetensi Rendah, Kesenjangan Bertambah</i>	05
<i>Program Transformasi Kemendikbudristek</i>	08
<i>Transformasi Pendidikan Melalui Program Sekolah Penggerak</i>	11

II

MEMBANGUN PARADIGMA BARU PEMBELAJARAN

<i>Membumikan Program Sekolah Penggerak</i>	21
<i>Memilih SDM Unggul</i>	28
<i>Bergerak Melaksanakan Pembelajaran Paradigma Baru</i>	31
<i>Lima Intervensi, Motor Penggerak PSP</i>	34

III

INSPIRASI DARI PELOSOK NEGERI

<i>Cerita Istana Ceria di Barito Utara</i>	38
<i>Ada Fajar di Banyuasin</i>	43
<i>Transformasi Matang dari Semarang</i>	49
<i>Kegigihan Hotnida Mengubah Sekolah</i>	57
<i>Cerita Siti dari Pulau Lembeh</i>	64

IV

POTRET TRANSFORMASI SEKOLAH PENGGERAK

<i>Transformasi Pendidikan di PAUD</i>	72
<i>Transformasi Pendidikan di SD</i>	79
<i>Transformasi Pendidikan di SMP</i>	84
<i>Transformasi Pendidikan di SMA</i>	88
<i>Transformasi Pendidikan di SLB</i>	92

V

DINAMIKA

V

REFLEKSI

LAMPIRAN / 114
CATATAN AKHIR / 117
DAFTAR PUSTAKA / 131



Cahaya di Ubuk Timur



Perjalanan Transformasi Program Sekolah Penggerak Angkatan Kesatu Tahun Pertama

A large, thick pink rectangular frame is centered on the page. It is open on the top and bottom sides, with the top bar missing and the bottom bar missing. The frame encloses the main title and subtitle.

BAGIAN I

TRANSFORMASI PENDIDIKAN

**PERJALANAN TRANSFORMASI PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK
ANGKATAN KESATU TAHUN PERTAMA**

TRANSFORMASI PENDIDIKAN



Gambar 1. Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim saat meluncurkan Merdeka Belajar Episode ke-7 Program Sekolah Penggerak, 1 Februari 2021.

SENIN pagi, 1 Februari 2021. Dari apartemennya di kawasan Jakarta Selatan, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menyapa jutaan rakyat Indonesia dari layar laptopnya. Ia mengenakan kemeja tanpa kerah dengan corak abu-abu. Di belakangnya berdiri rak kayu berwarna gelap berisi buku-buku tebal berbahasa asing. Di luar, pandemi Covid-19 masih mengancam, menyentuh 4.353.370 kasus per 31 Januari 2021 dengan 144.320 warga Indonesia meninggal dunia sejak diumumkan setahun sebelumnya, 2 Maret 2020.

Pagi itu, dengan wajah tirusnya yang cerah, Nadiem meluncurkan Program Sekolah Penggerak (PSP). Program ini merupakan episode ke-7 Merdeka

Belajar. Episode pertama tentang Asesmen Nasional, Ujian Sekolah Berstandar Nasional, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan Penerimaan Peserta Didik Baru diluncurkan pada 11 Desember 2019. Hingga September 2022, Kemendikbudristek sudah meluncurkan 22 episode Merdeka Belajar.

Menurut Nadiem, untuk memperbaiki dunia pendidikan tanah air, perlu dilakukan transformasi pendidikan. Hal tersebut dijalankan untuk mencapai Visi Pendidikan Indonesia yaitu, "Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang (1) Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia, (2) Berkebhinekaan global, (3) Bergotong royong, (4) Kreatif, (5) Bernalar kritis, dan (6) Mandiri."

Dengan tatap tajam dan senyum simpul ke arah laptop, Mendikbudristek menjelaskan latar belakang PSP dan mengapa dunia pendidikan membutuhkannya.

A. *LEARNING LOSS*

BUPATI Cianjur Herman Suherman kaget. Senin pagi, 13 September 2021, di sebuah Sekolah Dasar di Jalan Siliwangi, ia menemukan siswa kelas IV lupa membaca. Namun, ia tidak sepenuhnya heran. Anak-anak dengan kemampuan belajar menurun tidak sekali-dua kali ia temui. Hal itu sudah menjadi fenomena di Cianjur, bahkan di berbagai penjuru nusantara dan dunia.

Menurutnya, di kawasan perdesaan terutama yang akses internetnya sulit, sulit akses internet, anak-anak seperti itu jumlahnya lebih banyak. Mereka rata-rata berasal dari keluarga tidak mampu karena tidak memiliki gawai dan kuota internet.



Gambar 2. Pelaksanaan ANBK 2022 di Banda Aceh

Temuan ini kemudian viral di jagad media massa nasional.

Kasus di Cianjur menegaskan penutupan sekolah sepanjang pandemi Covid-19 sejak awal Maret 2020, menyebabkan kemampuan dan minat belajar siswa menurun (*learning loss*). Penelitian di Amerika Serikat mengungkap anak-anak usia Taman Kanak-kanak (TK) mengalami penurunan kemampuan literasi (*literacy loss*) sebesar 67% selama penutupan sekolah (Bao, Xue, et al, 2020). Risiko lebih tinggi dialami oleh siswa yang tinggal di kawasan terluar, terdepan, dan tertinggal di tanah air (Cerelia et al, 2021). Lembaga penelitian Smeru menyebut penghentian kegiatan belajar regular akibat pandemi Covid-19 berdampak lebih besar pada penurunan kemampuan siswa daripada dampak akibat libur sekolah (Beatty et al, 2020).

Untuk mencegah ketiadaan kegiatan pembelajaran selama pandemi, Kemendikbudristek menggandeng sejumlah pemangku kepentingan seperti TVRI, RRI, PLN, dan Telkom untuk menjangkau siswa yang berada di kawasan minim infrastruktur melalui kegiatan pembelajaran luring dan semi luring. Selain itu, kurikulum yang adaptif dan metode pembelajaran yang

variatif menyebabkan peningkatan partisipasi aktif bagi siswa yang kurang mampu dan berada di daerah terpencil.

Program Belajar dari Rumah (BdR) yang dijalankan pemerintah, yang dikombinasi dengan pembelajaran secara daring melalui televisi dan radio, tidak mampu mencegah siswa dari penurunan minat dan kemampuan belajar. Penelitian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan, selama BdR kegiatan pembelajaran oleh guru didominasi dengan aktivitas pemberian tugas, jarang menjelaskan materi, diskusi dan tanya jawab. Merasakan fenomena tersebut, lebih dari 70% responden siswa menyatakan tidak senang belajar dari rumah.

Banyak penelitian menunjukkan *learning loss* berdampak fatal jika terus dibiarkan. Pada 2020, Bank Dunia melaporkan *learning loss* berdampak pada penurunan skor PISA dan berlanjut pada penurunan pendapatan siswa Indonesia saat bekerja. Penelitian Kemendikbudristek dan INOVASI menemukan bahwa terjadi penurunan kemampuan belajar dan peningkatan angka putus sekolah di kalangan siswa sebagai dampak *learning loss*.

B. KOMPETENSI RENDAH, KESENJANGAN BERTAMBAH



Gambar 3. Ilustrasi

SEJUMLAH survei tentang literasi siswa berskala internasional seperti *Progress in International Reading Literacy Study* (PIRLS), *Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS), dan *Programme for International Student*

Assessment (PISA), secara konsisten meletakkan posisi Indonesia di level terendah. Bahkan, survei tiga tahunan PISA yang dilakukan sejak 2000 hingga 2018 secara tegas menunjukkan kompetensi literasi membaca, matematika, dan sains siswa Indonesia tertinggal jauh dibandingkan negara lain. Skor literasi membaca siswa Indonesia pada tahun 2000 dan 2018 sama yaitu 371. Artinya, selama 18 tahun, dari sisi literasi membaca, dunia pendidikan tanah air mengalami stagnasi.

Hal ini diperparah dengan fakta bahwa, pada tiga bidang itu, sebagian besar siswa tidak mampu meraih kompetensi minimal. Bukan hanya siswa, kondisi tak jauh berbeda dialami guru. Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) selalu tidak menggembirakan. Berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah tahun 2019, nilai rata-rata UKG guru jenjang SD sebesar 54,80, guru SMP 58,60, dan guru SMA 62,30. Rata-rata nilai UKG nasional, secara agregat, yaitu 57 dari nilai maksimal 100. Hal ini mengindikasikan ada problem besar yang tengah dihadapi para guru terkait profesi mulia yang dijalannya.

Faktor Penyebab Rendahnya Kompetensi Guru

FAKTOR 1 Rekrutmen Guru

FAKTOR 2 Putusnya Pengembangan Kompetensi Guru

Kompetensi guru terekam rendah disinyalir karena dua faktor. Faktor pertama terletak pada rekrutmen guru. Rekrutmen dilakukan tidak profesional. Imbasnya, input guru tidak memadai. Hal itu tampak dari proses pembelajaran di ruang kelas yang tidak berfokus pada siswa—kebanyakan guru memosisikan siswa sebagai objek pembelajaran.

Faktor kedua terletak pada keterputusan pengembangan kompetensi guru. Guru tidak melanjutkan pelatihan atau kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi pedagogisnya. Dampaknya, sebagian guru tidak belajar mandiri karena tidak ada instrumen yang “memaksa” mereka untuk terus mengembangkan diri. Dana tunjangan profesi pun digunakan untuk menambah koleksi properti, bukan untuk meningkatkan kompetensi, wawasan, dan kepemilikan perangkat pendukung pembelajaran. Berdasarkan laporan OECD/ADB (2015), hanya sedikit guru yang mendapatkan pembinaan oleh rekan guru berpengalaman, pengawas, kepala sekolah, dan fasilitator eksternal.

Problem lainnya yaitu kesenjangan kualitas pendidikan antardaerah. Ini menjadi isu serius karena penyebab terbesarnya adalah ekonomi dan politik—permasalahan lain tak kalah hebat di antaranya adalah pendanaan



Gambar 4. Ilustrasi

Yang tidak memadai, defisit sumber daya manusia antardaerah, kekeliruan pada struktur insentif, dan tak memadainya manajemen pengelolaan. Desentralisasi daerah yang dimulai pada 2001, yang juga diikuti oleh desentralisasi layanan pendidikan, membuat dunia pendidikan rentan politisasi. Rosser (2018) menulis praktik politik dan kekuasaan di daerah berperan kuat pada penyediaan, pengelolaan, dan rekrutmen guru.

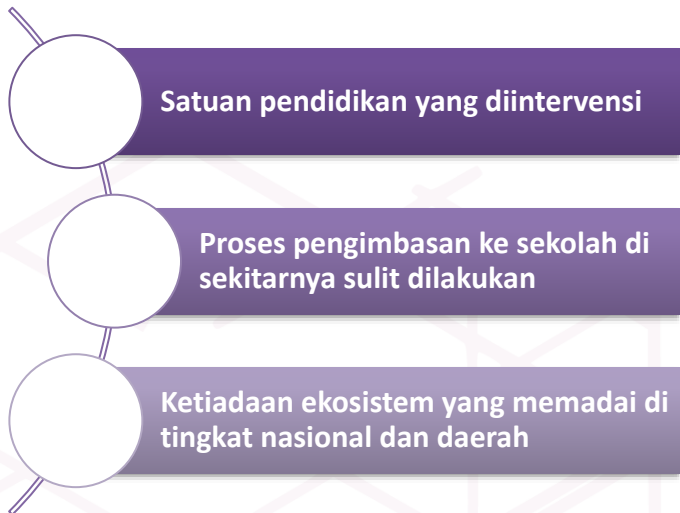
Mutu pendidikan antardaerah juga mengalami disparitas. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Berdasarkan data AKSI SMP tahun 2019, rata-rata skor literasi matematika, membaca, dan sains siswa DKI Jakarta dan DI Yogyakarta lebih baik daripada siswa di daerah lain, baik di pulau Jawa maupun di luar Jawa. Fakta tersebut menunjukkan, secara geografis, terjadi ketimpangan kualitas pendidikan antardaerah. (Kemendikbud, 2020)

C. PROGRAM TRANSFORMASI KEMENDIKBUDRISTEK

KONDISI geografis Indonesia yang berpulau-pulau, yang berdampak pada tidak meratanya sarana infrastruktur, turut memengaruhi akses masyarakat pada pendidikan. Ketersediaan jalan umum, sambungan listrik, dan jaringan internet menjadi masalah utama, terutama pada satuan pendidikan di kawasan tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Situasi ini mendorong Pemerintah untuk menjalankan strategi yang berdampak luas pada aspek pemerataan akses dan peningkatan kualitas satuan pendidikan.

Strategi transformasi pendidikan yang telah berjalan yaitu berupa pembentukan satuan-satuan pendidikan percontohan di sejumlah daerah. Satuan pendidikan yang ditunjuk mendapat intervensi atau perlakuan khusus terkait penganggaran dan manajemen sekolah. Dengan adanya intervensi tersebut, kualitas sekolah dapat dikontrol. Sekolah berkualitas itu kemudian melakukan pengimbasan kepada sekolah lain di sekitarnya. Dengan demikian, akan bermunculan sekolah-sekolah berkualitas di sebuah daerah. Kebijakan yang pernah berjalan antara lain Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Sekolah Rujukan, dan Sekolah Model.

Namun kebijakan tersebut dipandang diskriminatif oleh masyarakat. Pemerintah dipandang menganakemaskan sebagian sekolah dan menganaktirikan sekolah lain. Terlebih, sekolah-sekolah percontohan tersebut menarik iuran besar kepada peserta didiknya sehingga muncul isu privatisasi satuan pendidikan. Secara faktual, kebijakan peningkatan kualitas satuan pendidikan melalui pendampingan khusus mampu menciptakan layanan pendidikan yang lebih baik.



Gambar 5. Lingkungan kaya literasi.

Problemnya, pengimbasan terhadap satuan pendidikan di sekitarnya berjalan lambat bahkan terkesan tak berjalan. Ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya.

1. **Satuan pendidikan yang diintervensi dipilih dari satuan pendidikan yang kondisinya sudah baik.** Akhirnya, alih-alih pemerataan kualitas pendidikan, yang terjadi adalah kesenjangan/disparitas yang lebar antara satuan pendidikan percontohan dan satuan pendidikan di sekitarnya.
2. **Proses pengimbasan ke sekolah di sekitarnya sulit dilakukan** karena program yang diberikan kepada satuan pendidikan percontohan bersifat bantuan dana dan sarana fisik. Program pun dipandang sekadar proyek. Dampak lanjutannya, sekolah intervensi yang tidak lagi mendapatkan pendampingan/bantuan tidak meneruskan program yang telah berjalan.

3. **Ketiadaan ekosistem yang memadai di tingkat nasional dan daerah** membuat program tersebut berjalan di tempat. Regulasi pun tidak ada sehingga keberlanjutan program tidak terjamin. Padahal suatu ekosistem berkembang jika didukung oleh regulasi, kebijakan, penganggaran berkesinambungan, dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan daerah. Fenomena yang tidak diharapkan pun muncul ketika Pemda, tanpa meminta persetujuan Pusat, mengganti kepala sekolah percontohan sehingga program yang tengah berjalan tidak maksimal bahkan terancam mundur.

UPAYA pemulihan pembelajaran terus dilakukan guna memupus dampak *learning loss* yang makin mengkhawatirkan. Kemendikbudristek sebagai regulator telah mengarahkan berbagai cara, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang untuk menghadapi *learning loss*.

Dana BOS, misalnya, dapat digunakan untuk mengadakan perangkat pembelajaran berbasis teknologi. Kurikulum 2013 diadaptasikan dengan situasi pandemi melalui pengutamaan materi pelajaran yang bersifat kecakapan hidup dan kompetensi praktis. Satuan pendidikan diberikan keleluasaan memilih kurikulum sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing, yaitu tetap menggunakan Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, atau Kurikulum Merdeka.

*Dana BOS
dapat digunakan untuk
mengadakan perangkat
pembelajaran berbasis
teknologi*

Berkelindan dengan pemulihan pembelajaran dari *learning loss*, usaha transformasi pendidikan terus berlanjut. Berangkat dari kebijakan yang telah berjalan dan terus disempurnakan, kini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi meluncurkan Program Sekolah Penggerak (PSP).

Prinsipnya tetap sama, yaitu sekolah pelaksana PSP melakukan transformasi diri kemudian melakukan pengimbasan kepada sekolah di sekitarnya. Lalu, jika demikian, apa perbedaan antara PSP dengan program transformasi pendidikan sebelumnya?

Program Sekolah Penggerak (PSP) dipandang sebagai penyempurnaan bagi program transformasi sekolah sebelumnya. Perbedaan dengan program sebelumnya sebagai berikut:

1. PSP diposisikan sebagai program kolaborasi antara Kemendikbudristek dan Pemerintah Daerah (Pemda) di mana komitmen Pemda menjadi kunci utama.
2. Intervensi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari SDM sekolah, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, hingga pendampingan Pemda.
3. Ruang lingkupnya mencakup seluruh kondisi sekolah baik negeri maupun swasta, bukan hanya sekolah unggulan.
4. Selama tiga tahun, sekolah pelaksana PSP mendapatkan pendampingan. Setelah itu, upaya transformasi sekolah dilakukan secara mandiri.
5. Integrasi program dengan ekosistem. Targetnya, seluruh sekolah di Indonesia menjadi Sekolah Penggerak.

Sekolah Penggerak didesain sebagai katalis yang mendorong sekolah agar fokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik. Selama ini, sekolah berfokus pada persoalan administrasi dan proses pendidikan sehingga melupakan luaran (*output*) pembelajaran. Hal ini dapat terpenuhi dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (kepala sekolah dan guru) yang andal.

Pada klaster I, satuan pendidikan memiliki kualitas capaian belajar pada 3 level di bawah, bahkan lebih rendah dari yang diharapkan berdasarkan

asesmen dan kurikulum. Kondisi satuan pendidikan klaster tidak memiliki lingkungan belajar yang aman, karena perundungan sering terjadi di lingkungan sekolah. Secara rutin terjadi gangguan pada kegiatan pembelajaran.

Satuan pendidikan di klaster II sudah mengalami beberapa perubahan kendati capaian hasil belajarnya masih berada di level yang belum diharapkan. Biasanya, pada tahap II, capai belajarnya masih berada 1-2 level di bawah harapan. Dibandingkan dengan satuan pendidikan tahap I, pada tahap II ini satuan pendidikan memiliki lingkungan belajar yang sedikit lebih baik. Meskipun perundungan masih terjadi, secara perlahan hal tersebut tidak menjadi norma. Satuan pendidikan tahap II pun belum mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis kebutuhan dan kemampuan siswa.

Pada tahap III, capaian belajar peserta didiknya sudah sampai pada level yang diharapkan sesuai dokumen kurikulum dan asesmen. Satuan pendidikan juga sudah dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Proses pembelajarannya tergolong berkualitas karena pengajaran oleh guru sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa-siswinya. Perencanaan program dan anggaran, oleh kepala sekolah, didasarkan pada hasil refleksi sehingga tidak ada kesenjangan di antara keduanya (program/kegiatan dan penganggaran).

Pada tahap IV, capaian pembelajaran berada di atas tingkat yang diharapkan. Kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Perbaikan pembelajaran dan perencanaan serta penganggaran satuan pendidikan berbasis refleksi. Peserta didik merasa aman, nyaman, dan senang selama berada di lingkungan sekolah. Satuan pendidikan tahap IV

ini diharapkan melakukan pengimbasan dan pendampingan (*mentoring*) kepada sekolah lain di sekitarnya.

Sumber: Naskah Akademik Program Sekolah Penggerak, Kemendikbudristek, 2020

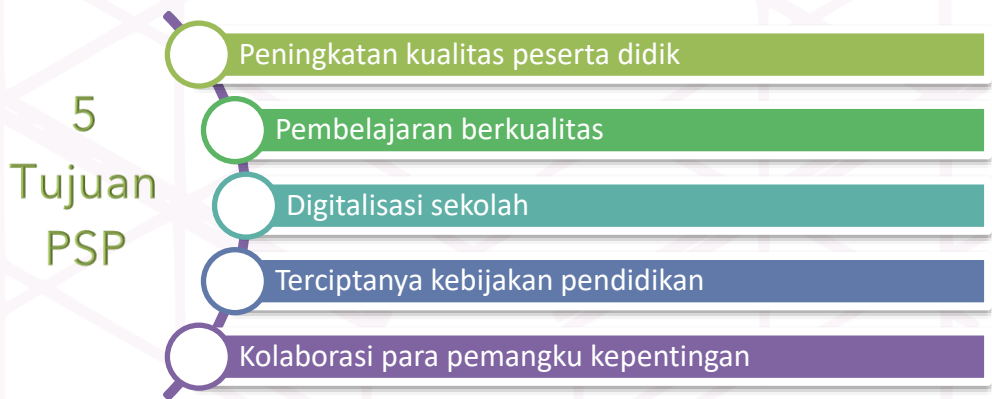


Gambar 6. Tahapan Transformasi Sekolah

Tujuan PSP secara umum adalah tercapainya hasil belajar siswa secara holistik, baik dari sisi kompetensi kognitif maupun nonkognitif (karakter) guna mewujudkan Profil Pelajar Pancasila dengan cara mendorong satuan pendidikan melakukan proses transformasi. Transformasi ini juga diarahkan untuk memicu tumbuhnya ekosistem pendukung perubahan dan gotong royong baik di tingkat daerah maupun nasional. Dengan demikian, diharapkan terjadi perubahan yang meluas dan melembaga, sehingga ke depan muncul SDM unggul, berkarakter, dan profesional. Program ini ditujukan kepada satuan pendidikan sekolah dan guru jenjang PAUD, SD,

SMP, SMA, dan SLB di 34 provinsi, pengawas/penilik, dinas pendidikan, dan pemangku kepentingan lain di tingkat daerah.

Dalam praktiknya, PSP tidak bisa dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Sekolah-sekolah yang merasa siap menjalankan transformasi melakukan pendaftaran dan menjalani seleksi. Namun, ke depan, semua sekolah akan menjadi sekolah penggerak.



Gambar 7. 5 Tujuan PSP

Setidaknya ada lima tujuan spesifik yang hendak dicapai oleh PSP. *Pertama*, peserta didik mengalami **peningkatan dari segi literasi, numerasi, dan karakter**. *Kedua*, terciptanya **pembelajaran berkualitas** melalui peningkatan kapasitas kepala sekolah dan guru. *Ketiga*, berlangsungnya **digitalisasi sekolah** untuk memudahkan guru dalam menjalankan pembelajaran yang inovatif dan kepala sekolah dalam melakukan evaluasi diri dan pengelolaan sekolah. *Keempat*, munculnya **kebijakan pendidikan** yang berfokus pada pemerataan pendidikan berkualitas melalui peningkatan kapasitas Pemda dalam melakukan evaluasi berbasis bukti. *Kelima*, para **pemangku kepentingan** di bidang pendidikan dalam lingkup satuan pendidikan, Pemda, dan Pusat mudah **berkolaborasi** dengan



menciptakan iklim yang kondusif.

Untuk mencapai tujuan di atas, Pemerintah melakukan sejumlah intervensi baik di level daerah maupun satuan pendidikan. Di level daerah, intervensi dilakukan berupa pendampingan konsultatif dan asimetris serta pendampingan perencanaan berbasis data. Di level satuan pendidikan, intervensinya berupa penguatan SDM di sekolah, pembelajaran dengan paradigma baru, pelatihan dan pendampingan perencanaan berbasis data, dan digitalisasi sekolah.



A large, thick pink rectangular frame is centered on the page. It is open on the top and bottom sides, with the top bar missing and the bottom bar missing. The frame encloses the main title and subtitle.

BAGIAN II

MEMBANGUN PARADIGMA BARU PEMBELAJARAN

**PERJALANAN TRANSFORMASI PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK
ANGKATAN KESATU TAHUN PERTAMA**

MEMBANGUN PARADIGMA BARU PEMBELAJARAN

II

SELASA siang, 22 November 2022. Di lantai teratas Hotel Novotel Makassar Grand Shayla, terlihat beberapa orang membentuk kelompok. Total ada 5 kelompok, tiap kelompok terdiri dari 9-13 orang. Pada salah satu kelompok, nampak seorang fasilitator berdiri sambil mengajukan sebuah pertanyaan.



Gambar 9 Repro: laman PSP Kemdikbudristek

“Telah kita ketahui bersama bahwa Program Sekolah Penggerak (PSP) telah berjalan 1 tahun. Bagaimana persepsi bapak/ibu terhadap PSP?” tanya fasilitator tersebut.

Orang-orang yang berada pada kelompok tersebut terdiam. Mereka yang merupakan perwakilan dari dinas pendidikan daerah, memilih tidak tergesa-gesa memberikan jawaban.

“Tidak perlu khawatir pendapat bapak/ibu salah. Karena kami tidak bermaksud menghakimi,” tambah fasilitator tersebut.

Setelah mendengar pernyataan fasilitator, segera ekspresi wajah para peserta segera berubah. Satu per satu, mereka mulai berani memberikan jawaban.

“Melalui PSP, daerah mendapatkan banyak keuntungan materi pembelajaran dengan paradigma baru, penguatan SDM (kepsek dan guru),

yang nantinya akan meningkatkan mutu pendidikan,” jawab Rukiyah Admayn, dari Dinas Pendidikan Kota Ternate.

“PSP mendatangkan banyak manfaat. Meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru, memenuhi kebutuhan TIK sekolah, mengubah cara mengajar dan belajar siswa melalui pembelajaran paradigma baru, dan memotivasi pendidik untuk saling berbagi praktik baik,” tambah peserta lainnya, yaitu Maria Sri Rahayuningsih dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rote Ndao.

“PSP mengubah manajemen sekolah, meningkatkan SDM terutama para guru, dan siswa lebih aktif-kreatif dalam pembelajaran,” sambut Safaruddin Bauw dari Dinas Pendidikan Kabupaten Fak-Fak.

Jawaban ketiga peserta tersebut berangkat dari pengamatan mereka terhadap satuan pendidikan yang mengikuti PSP di daerahnya masing-masing. Mereka menambahkan bahwa kondisi tersebut dapat direalisasikan melalui penguatan kepala sekolah dan para guru yang ada pada satuan pendidikan pelaksana PSP.

Jawaban para peserta yang tergabung dalam kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program Inovasi dan Transformasi Pembelajaran (Refleksi Program PSP, IKM, dan PBD) Regional II mulai 21 s.d. 24 November 2022 tersebut, mendekati empat gambaran akhir yang hendak dicapai oleh sekolah pelaksana PSP, yaitu:

- 1** Hasil belajar siswa, terutama literasi dan numerasi, berada di atas level yang diharapkan.
- 2** Terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan.
- 3** Pembelajaran berpusat pada murid.
- 4** Guru dan kepala sekolah selalu melakukan refleksi diri terkait perencanaan program dan anggaran serta perbaikan pembelajaran dilanjutkan dengan pengimbasan kepada sekolah di sekitarnya.

Gambar 10. Gambaran akhir yang hendak dicapai oleh sekolah pelaksana PSP

Lantas, bagaimana jalan menuju empat gambaran akhir yang hendak dicapai oleh sekolah pelaksana PSP tersebut?

Pada awal tahun 2021, Kemendikbudristek telah melaksanakan rangkaian kegiatan PSP mulai dari sosialisasi, penetapan daerah, seleksi kepala sekolah hingga memberikan lima dukungan dalam rangka mewujudkan keempat gambaran akhir di atas.

A. MEMBUMIKAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK



Gambar 11. Tihabsah Kepala Sekolah

SD Negeri 26 Banda Aceh.

SUATU pagi di akhir Februari 2021, Tihabsah, Kepala Sekolah SD Negeri 26 Banda Aceh, bergegas berangkat ke Aula UPTD Tekkomdik Kota Banda Aceh. Setiba di lokasi tujuan, ia melihat kehadiran beberapa kepalasekolah lainnya. Total ada 100 orang kepala sekolah mulai

jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SLB se-Kota Banda Aceh. Sabtu, 27 Februari 2021 itu, Tihabsah beserta kepala sekolah se-Kota Banda Aceh sedang menghadiri undangan Kegiatan Gema Program Sekolah Penggerak (PSP) Tahun 2021, yang diselenggarakan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Aceh, yang waktu itu masih bernama Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Aceh.¹

Samiran, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, yang didaulat sebagai pembuka acara, menyampaikan arahan bahwa Gema Program Sekolah Penggerak merupakan bentuk Sosialisasi Kebijakan Kemendikbud dan LPMP Provinsi Aceh, seputar PSP dan bagaimana tahapan yang dilaksanakan serta informasi tentang seleksi calon kepala sekolah penggerak.

Selain Kota Banda Aceh, tambah Saminan, kegiatan ini juga akan dilaksanakan di Bireun, Nagan Raya dan Aceh Barat Daya.



Gambar 12. Pembukaan Kegiatan Gema Program Sekolah Penggerak (PSP) tahun 2021, yang diselenggarakan BPMP Provinsi Aceh.

"Program ini menjadi tolak ukur kita bahwa kepala sekolah, pengawas, penilik, dan semua guru secara bersama-sama membangun percepatan perubahan pengajaran di sekolah. Ada paradigma yang harus menjadi perubahan tolok ukur kita ke depan, bahwa PSP ini diharapkan mampu memberikan perubahan yang berarti untuk kemajuan pendidikan di Indonesia," ujarnya.

Kegiatan itu juga dihadiri Amirudin, Widiyaprada BPMP Provinsi Aceh, yang menjelaskan tentang panduan pendaftaran PSP.

Setelah mengikuti Gema PSP, Tihabsah beserta seluruh kepala sekolah segera pulang, mempersiapkan pendaftaran sebagai calon kepala sekolah penggerak.

"Kami disuruh ikut semua. Pak Kadis kami menginstruksikan semua

sekolah wajib ikut PSP,” cerita Tihabsah di ruang kerjanya, Kamis 27 Oktober 2022.

Sosialisasi yang dilakukan BPMP Provinsi Aceh di atas juga dilaksanakan seluruh BPMP yang berada di 34 Provinsi Indonesia. Ada dua tujuan yang hendak dicapai. *Pertama*, publikasi dan memberikan pemahaman tentang PSP kepada pemerintah daerah; dan *kedua*, mendapatkan informasi kesanggupan pemerintah daerah untuk melaksanakan PSP.

Sosialisasi ke 34 provinsi tersebut merupakan tindak lanjut dari peluncuran PSP oleh Mendikbudristek melalui siaran langsung di kanal Youtube Kemendikbud RI, pada Senin 1 Februari 2021. Turut hadir dalam peluncuran ini, Sekretaris Jenderal

Kemendagri,

Muhammad Hudori, dan

Ketua Komisi X DPR RI

Syaiful Huda. Kehadiran

mereka merupakan bentuk

dukungan terhadap

PSP, khususnya untuk

mendorong dan meyakinkan pemerintah daerah agar berpartisipasi aktif, karena PSP merupakan kolaborasi antara Kemendikbudristek dengan Pemda, di mana komitmen Pemda menjadi kunci utama.

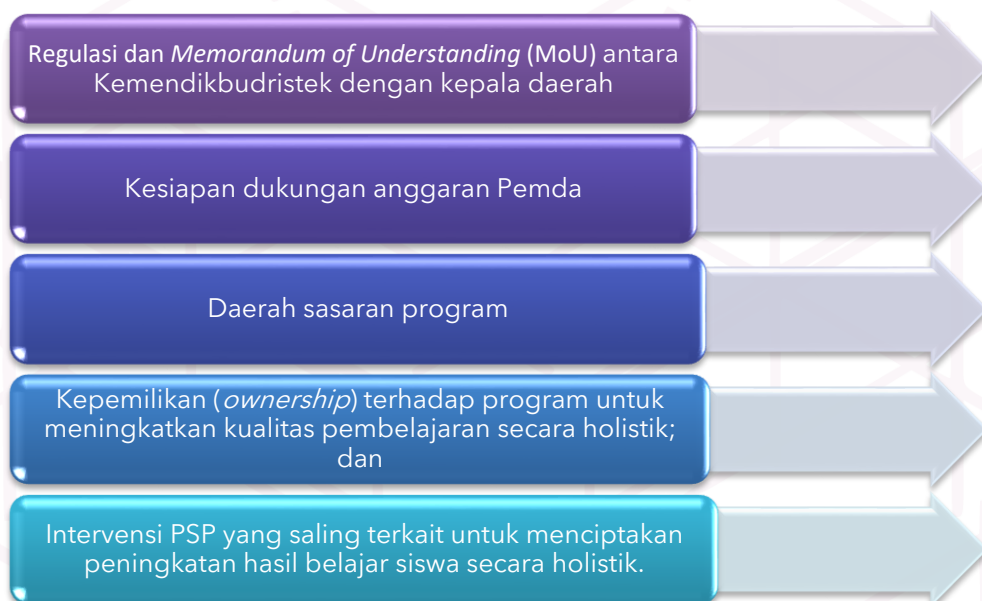
Kegiatan sosialisasi PSP tidak berhenti. Kemendikbudristek melanjutkannya melalui unit utama, seperti Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdas, Dikmen), sebagai upaya penguatan pemahaman terhadap program, khususnya kepada pemerintah daerah yang sudah menyatakan



Gambar 13

kesediaan dan komitmen terhadap PSP. Dalam kegiatan sosialisasi ini, pemaparan disampaikan langsung oleh para direktur dari dua unit utama tersebut.

Terdapat beberapa hal penting mengenai PSP yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi ke dinas pendidikan, di antaranya:



Gambar 14. Tema penting PSP dalam kegiatan sosialisasi ke Dinas Pendidikan

Komitmen Bersama

Sosialisasi PSP di atas disambut antusias oleh kepala daerah. Salah satunya adalah Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman. Menurutnya, PSP dapat mempercepat pemerataan mutu pendidikan di daerahnya.

"Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat mendukung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menjalankan PSP. Semoga dengan adanya sekolah penggerak akan membantu Provinsi Bangka Belitung mempercepat pemerataan mutu pendidikan, baik dari sisi sarana prasarana sekolah, kualitas kepala sekolah dan para guru yang

mengajar serta tenaga pendidik lainnya,” ujar Erzaldi Rosman sebagaimana dimuat akun Youtube Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, 1 Februari 2021.

Hal senada disampaikan Bupati Gunungkidul, Badingah, yang sangat bersyukur karena Gunungkidul terpilih sebagai pelaksana PSP pada tahun 2021. Ia berharap, program ini dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di satuan pendidikan, membuat pembelajaran lebih menarik dan juga menyenangkan, serta ada efek *multiplier* dari sekolah penggerak ke sekolah lainnya, sehingga mempercepat peningkatan mutu pendidikan di daerahnya.

“Kami akan berkomitmen dan berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia demi suksesnya PSP ini. Semoga sekolah penggerak dapat menjadi katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dan khususnya di Kabupaten Gunungkidul,” ujarnya.

Kesediaan kepala daerah yang diiringi dengan komitmen tersebut, merupakan bagian dari ketentuan dalam Kepmendikbudristek No 371/M/2021 tentang PSP. Dalam aturan ini disebutkan bahwa Kemendikbudristek menetapkan semua pemerintah daerah provinsi, dan menetapkan secara bertahap pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penyelenggara PSP, berdasarkan pertimbangan kriteria minimal dan mekanisme.

Ada 3 kriteria minimal penyelenggara PSP. *Pertama*, pemerintah daerah bersedia dan sanggup menyelenggarakan PSP pada satuan pendidikan di wilayahnya. *Kedua*, ada kebijakan/peraturan daerah/program pembangunan daerah yang mendukung kemajuan pendidikan; dan *ketiga*, komitmen daerah berupa alokasi anggaran pendidikan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara itu mekanisme penetapan daerah sebagai pelaksana PSP terdiri dari tiga langkah. *Pertama*, Kemendikbudristek memastikan pemerintah daerah siap menyelenggarakan PSP. *Kedua*, Kemendikbudristek melakukan penetapan berdasarkan kriteria minimal dengan mempertimbangkan keterwakilan daerah yang merepresentasikan keragaman wilayah Indonesia, dan *ketiga*, pemerintah daerah pelaksana PSP menandatangani Nota Kesepakatan dengan Kemendikbudristek.

Berdasarkan pertimbangan kriteria minimal dan mekanisme tersebut, PSP Angkatan 1 berhasil menjaring komitmen pemerintah daerah, yaitu sebanyak 111 dinas kabupaten/kota dan 34 dinas provinsi.

Tahap selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Kepmendikbudristek No 371/M/2021 tentang PSP, bahwa pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang telah ditetapkan menjadi pelaksana PSP, akan ditindaklanjuti dengan Nota Kesepakatan yang ditandatangani antara pemimpin unit utama terkait pada Kemendikbudristek dengan masing-masing kepala daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.



*Gambar 14. Pemerintah Kota Banda Aceh
tanda tangani Nota Kesepakatan PSP*

Salah satu pemerintah daerah yang mengunggah momentum penandatanganan Nota Kesepakatan tersebut adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.

Hal ini sebagaimana dilaporkan perkim.bandaacehkota.go.id, bahwa pada Selasa, 19 Januari 2021, Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman

menandatangani Nota Kesepahaman PSP di Balaikota Banda Aceh. Penandatanganan Nota Kesepakatan tersebut disaksikan Kepala LPMP Aceh (saat ini bernama BPMP), Muslihuddin, mewakili Mendikbudristek.²

Dalam sambutan, Aminullah Usman menyambut baik terpilihnya Kota Banda Aceh sebagai *pilot project* PSP dari 110 kabupaten/kota di Indonesia. Menurutnya, terpilihnya Banda Aceh merupakan sebuah kepercayaan dari Pemerintah Pusat yang harus terus dipertahankan, terutama dari sisi mutu pendidikan.

Lebih jauh, ia mengatakan bahwa PSP merupakan program yang sejalan dengan visi misi Banda Aceh, yaitu Gemilang dalam Bingkai Syariah, di mana prioritas pembangunannya pada sektor agama, ekonomi, dan pendidikan.

"Dalam visi-misi kita, pendidikan menjadi prioritas karena kota ini juga dikenal sebagai kota referensi pendidikan. Alhamdulillah, ketika dipercaya sebagai *pilot project* PSP maka akan semakin kuat tekad kita bisa merealisasikan visi-misi tersebut," ungkap Aminullah optimis.

Selain Banda Aceh, pemerintah daerah lainnya yang terpilih sebagai penyelenggara PSP Angkatan 1 juga melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan PSP.

Adapun ruang lingkup Nota Kesepakatan antara Kemendikbudristek dengan pemerintah daerah paling sedikit meliputi:

1. kesediaan pemerintah daerah untuk tidak merotasi pengawas atau penilik, kepala satuan pendidikan, guru/pendidik PAUD, dan tenaga administrasi satuan pendidikan selama paling sedikit 4 (empat) tahun di sekolah penggerak;
2. kesediaan alokasi anggaran daerah untuk mendukung

penyelenggaraan PSP; dan

3. pembentukan kebijakan daerah untuk mendukung PSP.

Nota Kesepakatan tersebut dinilai penting karena PSP merupakan kolaborasi antara Kemdikbud dengan pemerintah daerah di mana, komitmen pemerintah daerah menjadi kunci utama. Lebih-lebih, pemerintah daerah akan melanjutkan pendampingan transformasi sekolah setelah 3 tahun secara mandiri.

Selanjutnya, Nota Kesepakatan tersebut disertakan dengan rencana kerja pemerintah daerah tentang PSP. *Pertama*, sosialisasi. Pada tahap ini, ada tiga kegiatan, yaitu melakukan sosialisasi PSP, menerbitkan surat edaran terkait PSP, dan menyebarkan informasi melalui berbagai media Pemda. *Kedua*, penetapan satuan pendidikan. Pada tahap ini ada 2 kegiatan yang harus dilaksanakan Pemda, yaitu membentuk tim panel dan menerbitkan keputusan penetapan satuan pendidikan.

Ketiga, pelaksanaan enam kegiatan, yaitu fasilitasi *in house training*, fasilitasi lokakarya tingkat kabupaten/kota, pembentukan dan aktivasi komunitas belajar/praktisi, pelatihan pemanfaatan *platform digital*, pemenuhan infrastruktur TIK, dan penyediaan fasilitas sanitasi dan perlengkapan proses. *Keempat*, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PSP.

B. MEMILIH SDM UNGGUL

BEBERAPA hari setelah mengikuti Gema Program Sekolah Penggerak (PSP) Tahun 2021, Tihabsah mulai mempelajari berbagai kriteria menjadi kepala sekolah PSP, mulai bagaimana ia mampu memiliki kompetensi

kepemimpinan, berpihak kepada peserta didik, menjadi bagian keberagaman dari seluruh wilayah di Indonesia, mampu mengembangkan diri dan orang lain, mampu memimpin pembelajaran, mampu memimpin manajemen satuan pendidikan, dan bagaimana mampu memimpin pengembangan satuan pendidikan.

Selain itu, Tihabsah juga mulai mengumpulkan berbagai persyaratan administrasi seperti memastikan diri telah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), memiliki sisa masa tugas sebagai kepala satuan pendidikan paling singkat 1 (satu) periode masa tugas, mengajukan surat pernyataan dukungan dari pimpinan, menyampaikan pakta integritas, menyampaikan surat pernyataan tidak mengundurkan diri, surat keterangan sehat, dan memastikan bahwa ia tidak sedang menjalankan hukuman disiplin atau tidak sedang menjalani proses hukum.

Setelah berbagai kriteria dan persyaratan administrasi tersebut dipenuhi, Tihabsah mulai melakukan pendaftaran pada laman yang disediakan oleh Kemendikbudristek, yaitu <https://app-sekolahpenggerak.simpkb.id/pendaftaran-sekolah-penggerak>. Pada tahap ini, Tihabsah melengkapi riwayat hidup, menulis esai serta mengikuti Tes Bakat Skolastik (TBS).

Dalam menulis esai, ia diminta untuk menjawab sejumlah pertanyaan mengenai motivasi mendaftar PSP, dan juga menceritakan pengalamannya sebagai pemimpin di satuan pendidikannya. Menurut Tihabsah, ada beberapa aspek yang ingin digali dari pengalaman yang diceritakan oleh kepala sekolah dalam lembar esai tersebut, di antaranya tindakan strategis yang telah dilakukan dan berdampak bagi sekolah, perubahan signifikan yang sudah diwujudkan di sekolah, pengembangan diri dan bimbingan terhadap orang lain, serta kesadaran untuk mengembangkan diri.

Sedangkan pada TBS, ia diberikan sejumlah subtes yang terbagi menjadi 3 kategori, yaitu tes verbal, kuantitatif, dan penalaran.

Pada seleksi simulasi mengajar dan wawancara, Tihabsah mengikutinya secara daring.

"Waktu itu saya juga dites mengajar secara daring di depan laptop," ujar Tihabsah di ruang kerjanya, Kamis 27 Oktober 2022.

Rangkaian seleksi kepala sekolah tersebut, menurut Katman, PIC PSP Kemendikbudristek, merupakan tahapan penting untuk memilih SDM Unggul di satuan pendidikan.



Gambar 14. Katman - PIC PSP

"SDM Unggul merupakan syarat utama untuk pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dalam upaya mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter,"

kata Katman di ruang kerjanya, lantai 14 Gedung E, Kompleks Kemendikbudristek, Senayan Jakarta, Senin 26 Desember 2022.

Menurut Katman, pada tahap seleksi selanjutnya, ada tim panel yang terdiri atas UPT Kemendikbudristek dan pemerintah daerah yang akan membuat pertimbangan (baca : rapat pleno) terhadap hasil penilaian kepala satuan pendidikan dengan memperhatikan hasil perbandingan dan keterwakilan keberagaman satuan pendidikan.³ Selanjutnya, mereka mengirimkan berita acara hasil pertimbangan kepada Dirjen GTK.

Setelah menerima berita acara dari tim panel, Dirjen GTK menetapkan hasil seleksi kepala satuan pendidikan yang berisi informasi mengenai daftar kepala satuan pendidikan yang akan ditetapkan sebagai kepala satuan pendidikan pada pelaksana PSP, dan daftar kepala satuan pendidikan yang lolos seleksi sebagai cadangan kepala satuan pendidikan pelaksana PSP. Selanjutnya, Dirjen GTK mengirimkannya ke Dirjen PAUD Dikdas Dikmen.

“Setelah menerima surat dari Dirjen GTK, Dirjen PAUD Dikdas Dikmen menetapkan satuan pendidikan pelaksana PSP, dan mencatatnya dalam Dapodik sebagai satuan pendidikan pelaksana PSP,” pungkasnya.

C. BERGERAK MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN PARADIGMA BARU

JUMAT, 30 April 2021, terbit Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor: 6555/C/Hk.00/2021 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak. Nama Tihabsah tertera pada Lampiran II SK tersebut, tepatnya pada nomor urut ke-24. Melihatnya, ia merasa senang dan segera mengumpulkan para guru SD Negeri 26 Banda Aceh, serta mengabarkan bahwa ia lulus tes seleksi calon kepala sekolah penggerak dan SD Negeri 26 Banda Aceh telah ditetapkan sebagai pelaksana PSP.

Selanjutnya, ia menyampaikan ragam kegiatan yang harus dilaksanakan oleh sekolah pelaksana PSP, mulai dari sosialisasi kepada wali murid, menyusun kebijakan/regulasi PSP, mengalokasikan sumber daya untuk pelatihan, melakukan perencanaan program dan anggaran berbasis data, mitigasi risiko, identifikasi dan penyelesaian masalah, memanfaatkan

platform teknologi, dan menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, Tihabsah memperoleh pendampingan konsultatif dan asimetris dari Kemendikbudristek dan pelatih ahli.

"Kami memperoleh pendampingan dari kementerian secara daring. Setelah itu baru ada pelatih ahli dari Universitas Syiah Kuala, namanya Pak Muhlis. Kami sering memperoleh pelatihan dari beliau, dan tercerahkan. Semua yang menjadi kendala kami, dapat terpecahkan," cerita Tihabsah.

Selain itu, SD Negeri 26 Banda Aceh memperoleh penguatan SDM sekolah, pembelajaran dengan paradigma baru, perencanaan berbasis data, dan digitalisasi sekolah.

Menurut Tihabsah, melalui dukungan tersebut, pelan-pelan sekolahnya mulai bergerak, dan secara bertahap tercipta transformasi pendidikan.



Gambar 15. Suasana belajar di SD Negeri 26 Banda Aceh

"Guru-guru kami nampak semangat dalam belajar, mengajar, dan

berkarya dalam Platform Merdeka Mengajar. Bahkan mereka nampak betah berlama-lama di sekolah untuk menunaikan tugas. Sedangkan para murid nampak merasa nyaman, aman, dan senang mengikuti pembelajaran yang menggunakan paradigma baru,” pungkas Tihabsah.

Selain sekolah, kegiatan PSP juga dilaksanakan oleh dinas pendidikan yang daerahnya terpilih sebagai pelaksana PSP Angkatan I. Salah satunya adalah Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Mereka juga melakukan rangkaian kegiatan seperti sosialisasi PSP, menyusun kebijakan/regulasi PSP, mengalokasikan sumber daya untuk pelatihan, melakukan perencanaan program dan anggaran berbasis data, mitigasi risiko, identifikasi dan penyelesaian masalah, sekaligus memastikan para sekolah penggerak memanfaatkan platform teknologi serta menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru.

“Dan semua kegiatan terus mengacu pada Platform Merdeka Mengajar,” ujar Ade Loenito, anggota *Project Management Office* (PMO) Dinas Pendidikan Kota Gorontalo saat mengikuti kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program Inovasi dan Transformasi Pembelajaran (Refleksi Program PSP, IKM, dan PBD) Regional II, di Hotel Novotel Makassar Grand Shayla, Selasa, 22 November 2022.

Safaruddin Bauw dari Dinas Pendidikan Kabupaten Fak-Fak menyebutkan bahwa dalam implementasi PSP, Kabupaten Fak-fak telah melaksanakan sosialisasi pentingnya mengikuti PSP. “Berikutnya, bekerja sama dengan BPMP dan BGP untuk meningkatkan SDM dan melaksanakan evaluasi rutin dengan MKKS, FKKS, MGMP tentang PSP, IKM, dan PBD,” ujarnya.

D. LIMA INTERVENSI, MOTOR PENGGERAK PSP

LIMA intervensi yang diberikan Kemendikbudristek kepada pemerintah daerah dan sekolah pelaksana PSP, memperoleh apresiasi tinggi dari para peserta Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program Inovasi dan Transformasi Pembelajaran (Refleksi Program PSP, IKM, dan PBD) Regional II. Menurut mereka, lima intervensi Kemendikbudristek yang terdiri dari pendampingan konsultatif dan asimetris⁴, penguatan SDM sekolah⁵, pembelajaran dengan paradigma baru⁶, perencanaan berbasis data⁷, dan digitalisasi sekolah⁸, berhasil menggerakkan sekolah untuk melakukan transformasi.

"Intervensi PSP lebih banyak dilakukan oleh Pemerintah Pusat mulai lokakarya, bantuan IT, hingga bantuan dana BOS Kinerja," ujar Ningsih, di Hotel Novotel Makassar Grand Shayla, Selasa, 22 November 2022.

Hal senada disampaikan oleh Hendra De Pretes dari Dinas Pendidikan Kota Ambon. Menurutnya, lima intervensi sangat membantu satuan pendidikan dalam melakukan transformasi pendidikan. Bahkan, ada dukungan berupa BOS Kinerja.

BOS Kinerja yang disinggung Ningsih dan Hendra adalah dana yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik sebagai sekolah berprestasi dan sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana PSP. Aturan teknis BOS Kinerja dapat dilihat pada Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

Selain itu, Kemendikbudristek juga memberikan bantuan TIK dan buku pada sekolah pelaksana PSP. Bantuan TIK di antaranya berupa laptop, *access point*, konektor, layar proyektor, speaker aktif hingga internet *router*. Sedangkan bantuan buku yang diberikan berupa modul yang mendukung implementasi pembelajaran menggunakan paradigma baru (Kurikulum Merdeka).

Ragam bantuan dan Lima Intervensi tersebut, otomatis disambut antusias oleh pemerintah daerah. Hal ini seperti pengakuan Markus Dju Djani dari Dinas Pendidikan Kota Kupang.

“Pemda sangat antusias menyambut program Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan belajar aktif siswa dan guru serta Kepsek,” ujar Markus dalam Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program Inovasi dan Transformasi Pembelajaran (Refleksi Program PSP, IKM, dan PBD) Regional II di Hotel Novotel Makassar Grand Shayla, Selasa, 22 November 2022.

Sedangkan Rukiah Admayn dari Dinas Pendidikan Kota Ternate mengatakan bahwa lima intervensi Kemendikbudristek tersebut sangat menunjang kegiatan PSP. “Sangat mendukung pelayanan PSP di daerah,” tegasnya.

BAGIAN III

INSPIRASI DARI PELOSOK NEGERI

**PERJALANAN TRANSFORMASI PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK
ANGKATAN KESATU TAHUN PERTAMA**

INSPIRASI DARI PELOSOK NEGERI

BANYAK kisah menarik yang dialami oleh para Kepala Sekolah pelaksana Program Sekolah Penggerak. Berikut ini sejumlah kisah tentang kegigihan orang-orang hebat dalam melakukan transformasi pembelajaran di sekolahnya.

A. CERITA ISTANA CERIA DI BARITO UTARA¹



Sri tak perlu menunggu waktu lama untuk merasakan dampak positif Program Sekolah Penggerak. Ia dan rekan guru lain merasa merdeka dalam belajar dan mengajar.

Gambar 16. Sri Suryati Wulandari

SRI Suryati Wulandari gelisah. Iklim pembelajaran di TK Istana Ceria, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, begitu-begitu saja. Monoton. Sebagai Kepala Sekolah Berprestasi 2018 dan Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia tingkat Kecamatan, situasi itu terasa membebani. Keteladanannya tak ada yang meneruskan.

“Kok kayaknya kemauan guru untuk belajar sangat rendah,” keluhnya. Ketika dibuka Program Sekolah Penggerak (PSP), setelah berkonsultasi dengan para guru, Sri mendaftar. Ia yakin, dengan PSP, TK yang dipimpinnya akan berubah menjadi lebih baik. Setelah menjalani serangkaian seleksi, akhirnya harapannya berbuah kenyataan.

Sri menjalani proses pelaksanaan PSP dengan suka cita. Ia segera merasakan atmosfer pembelajaran melingkupi seluruh aktivitas TK. Bersama dengan guru-gurunya, ia mengikuti serangkaian pelatihan PSP dan mendalami wawasan, serta meningkatkan kompetensi melalui Komite Pembelajaran.

Setidaknya, ada dua perubahan luar biasa yang ia dan para guru alami. *Pertama*, mereka mengenal teknologi informasi lebih dalam. Mereka intens berinteraksi dengan program dan aplikasi yang sebelumnya tak pernah tersentuh. Terlebih, setelah menerima bantuan satu laptop Chrome Book dari Kemendikbudristek mereka segera memasang *hotspot wifi* agar laptop tersebut bisa berdaya guna. “Kami mengaktifkan SIMPKB dan akun *belajar.id*. Kami mulai mengelola Dapodik dengan baik karena kami mulai mengenal kebutuhan kami.” *Kedua*, untuk berubah, mereka tak punya pilihan lain selain belajar. Malas bukanlah opsi yang dibolehkan.

Perubahan guru juga diikuti oleh siswa. Cara belajar mereka berubah. “Dari monoton menjadi bervariasi, ada P5. Jadi lebih asyik,” ungkap Sri. Menurutnya, anak-anak lebih mudah menerima pelajaran. Jika dulu setiap belajar harus duduk sesuai instruksi guru, kini gurulah yang memenuhi keinginan belajar anak. “Guru juga tidak capek.”



Gambar 17. Beragam kegiatan di TK Istana Ceria

Tak dipungkiri awalnya terasa berat. Masih meraba-raba tentang model pembelajaran berdiferensiasi. Maklum, angkatan ke-1, belum punya banyak referensi sekolah yang berbagi praktik baik. Namun, seiring waktu, guru mulai paham tentang Kurikulum Merdeka. Anak-anak pun terlihat senang karena kegiatan pembelajaran lebih bervariasi, di antaranya ada kegiatan kunjungan, *class meeting*, *cooking class*, *market day*, dan jalinan kerja sama dengan mitra.

Bermitra dengan Polres dan Perpustakaan Daerah

DULU kegiatan keluar kelas hanya kunjungan ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) untuk keperluan pemberian vitamin dan imunisasi. Sekarang, mitra TK Istana Ceria bertambah. *Pertama*, Kepolisian Resor Kabupaten Barito Utara. Pada November 2022, berkolaborasi dengan TK Negeri 1 Pembina Muara Teweh, Sri membawa anak-anak ke Polres untuk mengikuti sosialisasi anti perundungan terhadap anak. Orang tua murid juga diundang. "Kami dulu merasa tidak perlu tahu tentang perundungan. Sekarang, setelah ikut PSP, jadi merasa perlu tahu."

Kedua, Perpustakaan Daerah (Perpusda). Kunjungan ini berangkat dari kebutuhan pada buku bernuansa lokal. Sri yakin anak-anak perlu tahusejarah dan kekhasan Barito Utara.

Di Perpusda, anak-anak belajar dengan menyenangkan karena dipandu oleh petugas perpustakaan yang atraktif. Ada kegiatan membacakan buku, bermain *games*, senam bersama, nonton bareng, pemberian kudapan, hingga pembagian hadiah. Guru dan orang tua mendampingi saja. Kunjungan bersama ke Perpusda dilakukan setiap bulan. Diharapkan, di lain hari, anak-anak itu berkunjung ke Perpusda bersama kedua orang tuanya.

Rencananya, tahun 2023 mendatang, Sri ingin berkolaborasi lagi dengan TK Negeri 1 Pembina Muara Teweh, melakukan kunjungan ke kantor pemadam kebakaran. Hal ini terkait dengan sosialisasi penanggulangan bencana kebakaran. Di Kecamatan Teweh Tengah, kata Sri, sering terjadi kebakaran rumah karena kelalaian manusia seperti membakar sampah lalu menyambar rumah, kompor gas meledak, dan korsleting listrik.

“Anak-anak perlu tahu penanganannya. Kami ingin anak-anak paham pada tugas pemadam kebakaran.”

Pada 17 Desember 2022, TK mengadakan *market day*. Anak-anak diajarkan untuk bertransaksi, mengenal makanan khas daerah, dan menunjukkan hasil karya selama satu semester. “Hasil karya ini merupakan kerja kolaborasi antara orang tua, guru, dan siswa. Anak-anak hanya menjual dan mempelajari cara transaksi jual-beli,” jelas Sri.

Sementara itu, siswa kelas B bersama guru membuat lempeng singkong (tumpi jawau). Makanan khas Barito Utara yang terbuat dari singkong ini dijual ke siswa dan orang tua. Sebagai acara hiburan, dipentaskan beragam tarian dan lagu daerah pada acara pembukaan.

Sri mengaku tak mengalami kendala berarti. Pendamping Ahli (PA) sangat membantu proses transformasi di sekolahnya. Di tahun ke-2, terjadi penggantian PA dan membuat Sri serta rekan guru lain perlu melakukan penyesuaian lagi. Namun, kembali, hal itu bukan kendala berarti.

Kini, hari-hari Sri dan rekan guru tak sekadar mengajar anak-anak. Mereka mulai diundang menjadi narasumber untuk berbagi inspirasi dan praktik baik kepada sekolah lain. “Kami merasa lebih dihargai. Sekolah kami lebih dikenal orang, menjadi contoh bagi TK yang lain. Kami terbuka untuk pembelajaran guru.”

B. ADA FAJAR DI BANYUASIN ²



Satu per satu tantangan dalam Program Sekolah Penggerak dilewatinya. Membangun kapasitas SDM dilakukan dengan penuh kesabaran.

Gambar 18. Siswa beraktivitas dengan laptop

FAJAR Wahyu Edi mengulas senyum ketika rekan sejawatnya bicara dengan nada meremehkan, “*Ngapain Pak Fajar, kok, alat saja masih pinjam pede ikut sekolah penggerak?*” Ia lalu menjawab, “Saya akan mencoba sejauh mana bisa berbuat yang terbaik untuk sekolah saya.”

Kondisi sekolahnya memang tidak sementering sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya. Peluang sekolah di pelosok desa dengan sinyal internet *superlemot* cukup kecil jika berhadapan dengan sekolah berstatus unggulan, model, atau rujukan di Kecamatan Banyuasin III. Namun, niat Fajar sudah terpancang kuat. Ia memang belum tahu betul tentang Program Sekolah Penggerak (PSP).

Hanya keyakinannya yang telah mantap bahwa program ini akan membawa perubahan di sekolah yang dipimpinnya. Berbekal restu dari para guru, ia mendaftar PSP. "Sudah, Pak, jalan saja dulu."

Restu guru tak kunjung membuat rasa pesimisme hilang dari hatinya. Fajar yakin gagal. Ia merasa bukan apa-apa. Pengalaman jadi kepala sekolah baru beberapa bulan. Sarana prasarana sekolahnya kalah jauh dengan sekolah elit lain di daerahnya. Namun, nasib berkata berbeda. Dari 13 pendaftar di Kecamatan Banyuasin III, hanya SD Negeri 8 yang lolos seleksi PSP angkatan ke-1.

Lolos seleksi tak jua membuat Fajar bernapas lega. Ia justru bimbang karena tak punya perangkat untuk mengikuti seleksi berikutnya berupa tes wawancara. Tak patah arang, Fajar menyambangi rekannya, meminjam perlengkapan komunikasi daring berupa proyektor dan alat peraga. Rekannya berasal dari sekolah model yang tidak lolos seleksi PSP angkatan 1 (sekolah model ini kemudian menjadi sekolah pelaksana PSP angkatan 2). Tes wawancara berjalan lancar. Tinggal menunggu hasil. Ternyata, hasilnya juga di luar dugaan: ia kembali lolos seleksi PSP. Fajar senang bercampur bimbang.

Fajar senang karena harapannya membuat perubahan menemui kenyataan.



Gambar 19. Pembelajaran proyek memanfaatkan lingkungan sekolah

Bimbang karena kapasitas sumber daya guru tak memadai. Guru berstatus PNS berjumlah 5 orang. Semuanya tidak lagi muda.

Bahkan menjelang pensiun. Satu lagi: tidak ada yang sesuai kualifikasi kecuali guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK).

Selebihnya lulusan Sekolah Pendidikan Guru (SPG). "Itu tantangan berat saya untuk maju. Saya tidak terbayangkan seperti apa, mereka sudah sepuh dan senior saya," ungkapnya.

Problem utama yang dihadapi guru senior adalah penguasaan teknologi informasi (TI). Mereka kaget ketika diharuskan mengoperasikan laptop dan komputer. Mereka jarang berinteraksi dengan kedua gawai itu. Ia memotivasi mereka bahwa guru harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman.



Gambar 20. Workshop KKG

Dengan sabar Fajar mengajarkan para guru mengoperasikan laptop.

Mereka enggan menyentuh laptop, takut rusak. Ia meminjami mereka laptop, tak jarang menyambangi rumah mereka satu per satu. Seminggu sekali ia mengecek perkembangan mereka. Sejumlah guru senior tampak pusing dan mulai menghindar darinya. Sebaliknya, guru honorer yang rata-rata masih muda tampak antusias belajar.

Lambat laun perubahan menjamah sekolah. Jika sebelumnya listrik hanya ada di ruang kepala sekolah, kini tiap kelas sudah tersentuh aliran listrik. Beberapa ruangan dilengkapi pendingin ruangan. Guru pun tidak lagi gagap laptop dan proyektor. Mereka kadang mengajar menggunakan layar proyektor. Tiga proyektor LCD dan 15 laptop Chrome Book bantuan Kemendikbudristek senantiasa menemani kegiatan pembelajaran baik dengan siswa di kelas maupun dengan teman sejawat di Komite Pembelajaran.

Kendala SDM tidak saja terletak pada penguasaan TI. Lebih dari itu, yaitu penguatan substansi pembelajaran. Hal ini yang membuat Fajar agak frustrasi. Fajar melihat awalnya guru tidak paham dengan pembelajaran berbasis proyek dan berdiferensiasi. Ia terus memotivasi dan mendampingi guru-guru agar senantiasa belajar dan meningkatkan kemampuan. Ia mengamati guru mengajar, baik di dalam maupun luar kelas. Setelah itu, ia mengajak mereka berdiskusi. Ia selalu memegang prinsip, "Kalau tantangan melemahkan kita, kita tidak akan sukses. Jadikan tantangan sebagai peluang."

Ada kasus menarik terkait pembelajaran berdiferensiasi. Di awal tahun ajaran, dari 23 siswa kelas IV, 8 siswa tidak bisa membaca. *Learning loss* benar-benar terbukti. Ia kemudian mendorong guru untuk memisahkan kedelapan anak dan memberi mereka perhatian khusus. Dengan prinsip berikan anak kesempatan sesuai dengan kemampuannya, kedelapan anak

tersebut mendapatkan pendampingan khusus. Kegiatan belajar di kelas tetap menghadirkan 23 siswa, tetapi delapan siswa mendapatkan perlakuan khusus.

Dari berbagai kendala di atas, bagi Fajar, hal tersulit dalam pelaksanaan PSP adalah mengubah paradigma guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Kebanyakan kepala sekolah dan pengawas masih berpegang teguh bahwa sekolah yang maju dilihat dari infrastrukturnya. Untuk mengikis hal itu, Fajar selalu mengajak guru agar terus belajar.

Dampak penerapan PSP tidak sekadar dirasakan guru. Siswa juga. Terutama dari segi karakter. Dulu siswa *slonong boy*, berkelakuan suka-suka saat masuk ruang kepala sekolah. Sekarang mereka selalu permisi dengan baik-baik. Mereka juga tak lagi lompat pagar saat pulang sekolah dan jajan di luar area sekolah. Siswa yang melanggar aturan pun tidak dihukum. "Pendekatan ke siswa berpikir logis, pemahaman. Ini saya sampaikan pada guru."

Kepercayaan Masyarakat Meningkat

PERUBAHAN di sekolah juga melibatkan orang tua/wali murid. Melalui kegiatan Komite Sekolah, ia menyampaikan berbagai kegiatan PSP. Dengan begitu, mereka tahu perubahan pola pembelajaran siswa dengan paradigma baru.

Satu hal yang kini masih berjalan adalah pembangunan musala sekolah. Fajar tidak yakin dana pembangunan musala terpenuhi oleh sumbangan dari orang tua siswa atau Komite Sekolah. Akhirnya disepakati untuk mengundang partisipasi alumni. Alumni yang tergolong sukses ditelusuri dan dihubungi. "*Alhamdulillah*, para alumni ada yang menyumbang

keramik lantai, atap, semen 30 sak, terserah mereka. Komite yang mengelola, sekolah menerima saja,” jelas Fajar. Setahun berjalan, musala 8x9 meter itu hampir selesai.

Program religi dalam rangka pencapaian Profil Pelajar Pancasila adalah membaca surat Yasin tiap Jumat bagi muslim/muslimah kelas IV, V, dan VI sebelum jam pelajaran dimulai. Ada pula hafalan Al-Quran juz 30. “Target saya, siswa yang tamat sudah hafal Al-Quran juz 30,” ungkap Fajar.

Fajar menilai, kepercayaan masyarakat pada pengelolaan sekolah meningkat setelah PSP berjalan. Sebab, perubahan karakter siswa menjadi lebih baik turut dirasakan di rumah. Pada penerimaan peserta didik baru tiap tahun pun animo masyarakat menyekolahkan anak-anaknya di sekolah pelaksana PSP meningkat.



Gambar 21. Workshop penyusunan modul ajar

Fajar kini merasakan perubahan besar sedang terjadi di sekolahnya. Ia melihat anak-anak mulai nyaman belajar dengan suasana menyenangkan. Tiap pagi siswa menyambut dan mencium tangannya. Guru-guru pun

sudah mulai tersenyum saat diajak bermusyawarah dan berdiskusi.

C. TRANSFORMASI MATANG DARI SEMARANG ³

*Asal dijalani dengan konsisten dan kerja keras, semua proses akan
menelurkan hasil gemilang.*

*Umi telah membuktikan Program Sekolah Penggerak mentransformasi
sekolahnya menjadi lebih berdaya.*



Gambar 22. Selebrasi proyek Profil Sekolah Penggerak & HUT Brinsa ke-40 dilaksanakan di SMPN 1 Bringin pada 26 Maret 2022

HARI-hari berat dirasakan Umi Mazro'ah. Di satu sisi ia sangat senang sekolah yang dipimpinnya, SMP Negeri 1 Bringin, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, menjadi pelaksana Program Sekolah Penggerak (PSP)

angkatan ke-1. Namun, di sisi lain, perjuangan untuk meyakinkan para guru bahwa PSP sangat penting sebagai sarana perubahan sekolah tidak semudah membalik telapak tangan.

Mengubah pola pikir (*mindset*), bagi Umi, seperti mengguyur batu koral. Yakin tindakannya akan membuahkan hasil, tetapi butuh waktu lama untuk menyeras manisnya. Orang yang berada di zona nyaman akan sulit bergerak atau berubah. “Diam saja tidak masalah, kenapa harus berubah? Itu bukan tantangan yang mudah untuk mengorganisasi SDM yang banyak,” ujarnya.

Kepada rekan guru, ia tak henti-henti bicara tentang urgensi beradaptasi dengan perubahan zaman. Kebutuhan siswa saat ini berbeda jauh dengan kebutuhan guru saat kecil dulu. Oleh karena itu, diperlukan terobosan-terobosan praktik pembelajaran untuk menghadapi tantangan zaman.

Kegiatan Komite Pembelajaran (Kombel) digencarkan. Pertemuan wajib digelar sekali seminggu, setiap Senin. Pertemuan lainnya diserahkan kepada tim Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Pelatihan SDM dan peningkatan kompetensi intens dilakukan. Beragam masukan dipelajari dan didiskusikan.

Namun, SDM bukan satu-satunya tantangan yang harus dihadapi. Tantangan lain adalah upaya mencari solusi atas ketidaktahuan atau ketidakpahaman terhadap implementasi kurikulum. Meskipun sekolah didampingi oleh Pelatih Ahli yang hebat, tetapi bagi Umi, itu tidak cukup.

“Secara konsep mereka ahli, melakukan pendampingan luar biasa, tetapi bagaimanapun belum pernah dan tidak tahu pelaksanaan di lapangan,” ungkap Umi.

Saat kasus-kasus insidental muncul, kenang Umi, belum tentu mereka

langsung mendapatkan solusi. Misalnya, persoalan tentang pengembangan asesmen dalam menilai Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Belum lagi cara mengambil tema pada P5, merinci tiap dimensi Profil Pelajar Pancasila (P3) dalam bentuk kegiatan, menyusun perencanaan, membuat rubrik penilaian, hingga penilaian. Belum lagi membuat modul ajar.



Gambar 23. *Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan berupa pengolahan sampah organik menjadi kompos*

“Ketika PSP di lapangan sangat tergantung pada kepala sekolah yang membuat kebijakan, pada titik itulah begitu berat ketika pertanyaan-pertanyaan itu tidak terjawab,” ujar Umi. Kadang kondisi ini membuat Umi frustrasi.

Umi bersyukur memiliki guru-guru yang cukup kooperatif untuk belajar. Ia terus mendukung mereka untuk mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan tanpa membuat mereka tertekan. Ia meyakinkan mereka

bahwa proses yang dijalani, meskipun berat, pasti akan membuahkan hasil.

Akhirnya, Umi merasa berhasil melewati fase sulit itu. Ia dan guru-guru belajar tidak sekadar memahami, melainkan juga mengaplikasikannya sesuai dengan kondisi masing-masing.

Semua upaya dilakukan agar siswa dan guru tidak stres. “Bagaimana kita *enjoy* menjalankan kebijakan yang dibuat Kementerian.



Gambar 24.
Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dengan tema Rekayasa dan Teknologi berupa pembuatan komposter sederhana.

Gawean banyak, tapi hati harus dibuat bahagia,” ujar Umi. Umi baru merasakan dampak perjuangannya setelah PSP berjalan sekitar 3–4 bulan. Ia melihat perlahan pola pikir (*mindset*) guru berubah.

Penguatan Kombel diarahkan pada implementasi inovasi

pembelajaran di ruang kelas. Ia memberi contoh tentang pemanfaatan ponsel. Dulu, ponsel tidak pernah digunakan sebagai media pembelajaran. Ponsel hanya tersimpan di saku dan tas siswa. Setelah penerapan PSP, guru menggunakan ponsel sebagai alat untuk mengakses sumber pembelajaran yang lebih luas di luar kelas. Ponsel juga dapat digunakan untuk mempresentasikan hasil belajar. Umi menyaksikan perubahan pola pembelajaran, pola pendekatan, dan strategi pembelajaran pada guru. Mereka sudah mulai menerima perubahan.

Untuk mempermudah pembelajaran, guru-guru menggunakan



beragam aplikasi sederhana yang juga dapat diakses oleh siswa seperti Canva, Google Site, dan Power Point. Dengan aplikasi, guru dan siswa memiliki kebebasan untuk merancang dan membentuk karya sesuai dengan kreativitas masing-masing. "Guru cukup antusias mengikuti perkembangan TI. Ini sangat menarik dan membahagiakan kita semua."

Perubahan di ranah guru kemudian merembet ke kalangan siswa. Umi melihat tingkat membolos siswa sangat rendah, bahkan tidak ada sama sekali. Ketika jam istirahat berlangsung, mereka yang tidak memiliki kesibukan atau bosan bermain berkunjung ke ruang musik dan memainkan alat musik di sana. Bagi Umi, ini merupakan dampak pembelajaran guru di ruang kelas. "Banyak guru mulai membuat anak senang," ungkap Umi.

Perubahan lainnya adalah berkurangnya kenakalan siswa. Indikatornya dapat dilihat dari menurunnya kasus yang ditangani oleh guru Bimbingan Konseling. "Anak tampak fokus menjalankan pembelajaran secara efisien," ungkap Umi. Kendati demikian, menurut Umi, hal ini tidak 100% mengindikasikan bahwa pembelajaran telah berjalan secara menyenangkan di kelas, tetapi perlu juga dilihat kebermaknaannya dalam diri siswa.

Soal Higher Order Thinking Skill (HOTS) pada Asesmen



Gambar 25. Studi banding SMP Pangudi Luhur Tlogo & SMP Negeri 7 Salatiga di SMPN 1 Bringin.

Antusiasme Umi dan guru dalam mewujudkan merdeka belajar dan merdeka mengajar diwujudkan dalam bentuk peluasan digitalisasi pembelajaran. Berangkat dari urgensi pembelajaran yang menyenangkan siswa dan pembelajaran berdiferensiasi, siswa tidak diwajibkan menggunakan ponsel. Mereka bebas menggunakan media digital apapun dalam menunjang pembelajaran. Saat asesmen/ujian, mereka dibolehkan membuka buku dan mencari bahan di internet.

Terkait ujian/asesmen akhir semester, bentuk soal yang dikembangkan tidak lagi konvensional dulu yang berbasis ingatan/hafalan sehingga membebani otak. "Kami kembangkan soal-soal HOTS sehingga anak-anak boleh *googling* dan buka buku."

Untuk menyiapkan soal-soal yang melibatkan kemampuan bernalar tingkat tinggi (HOTS), Umi membentuk tim di Kombel. Tim ini kemudian melatih guru-guru di kelompok kecil per mata pelajaran (mapel) untuk membuat soal-soal HOTS seperti soal pada Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). Soal-soal ini lalu digunakan sebagai asesmen non mapel yang berdampingan dengan soal mapel lainnya pada penilaian akhir semester.

Penyusunan soal asesmen juga memperhatikan proses berpikir dan menulis siswa. Menimbang kini tengah terjadi krisis di kalangan siswa terkait kemampuan menulis dengan tangan (lebih sering mengetik di laptop dan ponsel), pengerjaan soal melibatkan kemampuan menulis. Tidak ada soal berbentuk pilihan ganda. Semua esai dan tulis tangan. "Saat asesmen, kelas menjadi tenang. *Googling* boleh, *nyontek* buku boleh. Pengawasnya tidak perlu sibuk menegur anak, karena mereka mulai berpikir untuk dirinya sendiri."

Umi yakin, kebijakan ini sangat positif bagi guru dan siswa. Guru dipaksa menyusun soal berbentuk HOTS. Siswa pun dibudayakan untuk belajar yang bermakna, tidak sekadar menghafal rumus dan teori. "Hal ini akan membangun budaya belajar."

lhwat penggunaan soal HOTS pada asesmen tengah dan akhir semester, sekolah sudah melakukan sosialisasi kepada orang tua siswa. Hal ini dilakukan agar tidak muncul protes dari mereka yang menilai soal lebih sulit dan siswa boleh membuka buku serta melihat internet dalam pengerjaannya.



Gambar 26. Workshop dan Deklarasi Program Sekolah Penggerak

*Angkatan ke-1 Tahun 2022 Tingkat Kabupaten Semarang di SMPN
1 Bringin.*

Dari perjalanan setahun pelaksanaan PSP, hal yang paling mengesankan Umi adalah saat gelar karya siswa. Pada acara ini dipamerkan tiga tema P5 untuk masing-masing kegiatan dalam bentuk stan. Kepada siswa ia berkata, "Nak, kamu sudah belajar menggunakan Kurikulum Merdeka selama satu tahun. Saya akan memberikan panggung pada kalian dan itu tidak murah. Kalau kalian memberikan hasil belajar terbaik, saya berikan panggung terbaik."

Tak dinyana, karya mereka membuat Umi terkejut. Melebihi ekspektasi. Dari kelas-kelas diferensiasi di mana tiap kelas punya produk yang ditampilkan seperti tarian, musik, dan produk digital, mereka mampu menciptakan karya yang layak tampil di panggung. Semua itu hasil pembelajaran di kelas, bukan hasil les di luar sekolah.

"Mereka belajar dari nol di sekolah. Kalau tidak ada Kurikulum Merdeka, mana sempat mereka manggung kalau tidak diekskul?"

Tamu yang diundang ke acara itu berasal dari unsur Pemda (Dinas Pendidikan), legislatif, Sekolah Penggerak (SP) angkatan ke-1 dan calon SP angkatan ke-2 jenjang TK, SD, dan SMP. Menurut Umi, acara itu membuat pemangku kebijakan terenyak. Seorang anggota DPRD Komisi D berkomentar dengan nada haru, "Saya kok baru tahu ini! Ini apa, *tho?*"

D. KEGIGIHAN HOTNIDA MENGUBAH SEKOLAH ⁴

la sempat mengibarkan bendera putih.

Kegigihannya menjalankan

PSP lambat laun mendorong perubahan signifikan di sekolahnya.

HOTNIDA Hutagaol angkat tangan. Ia stres. Berulang kali pihak yayasan menegurnya. Seuntai ucapan sarkas menggelayuti pikirannya. "Kapan kamu *ngerjain* urusan sekolah? Murid yang penting! Sehebat apapun kau, muridmu sedikit, itu *enggak* ada guna!"

Nida sadar, sebagai kepala sekolah, ia tidak boleh terlalu sering meninggalkan SMA Santa Patricia Tangerang, Banten. Dua program yang wajib diikutinya, pelatihan Program Sekolah Penggerak (PSP) dan penguatan Kepala Sekolah, sangat menyita waktu. Pelatihan PSP berupa lokakarya dan pendampingan kurikulum dari Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Bahasa, sejak



Gambar 27. Program Roots yang merupakan bagian dari PSP dengan deklarasi sekolah antiperundungan.

September 2021, membuatnya harus meninggalkan rumah dan sekolah. Berpindah dari satu hotel ke hotel lain dan Pusdiklat Kemendikbudristek di Depok, Jawa Barat. Penguatan Kepala Sekolah selama tiga bulan, September-Desember 2022, memaksanya untuk mengatur napas. Dunia nyata dan dunia maya dijalannya selang-seling siang dan malam tanpa jeda.

"Itu benar-benar membuat saya mau pingsan. Kadang-kadang harus pakai 2 laptop. Ada *zoom* dari PSP, ada *zoom* dari Penguatan," ujarnya.

Terpaksa ia harus memilih dan pilihannya adalah sekolah. Maka, di pertengahan Januari 2022, ditemuilah Pelatih Ahli yang selama ini mendampinginya dalam pelaksanaan PSP. kepadanya, ia menyatakan ingin mundur.

"Kalau Ibu mengundurkan diri, disuruh mengembalikan uang." Jawaban Pelatih Ahli membuat nyalinya ciut. Mengembalikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja, di luar perkiraannya. Bagaimana ia mengembalikan uang itu? Nida kembali menelan dilema.

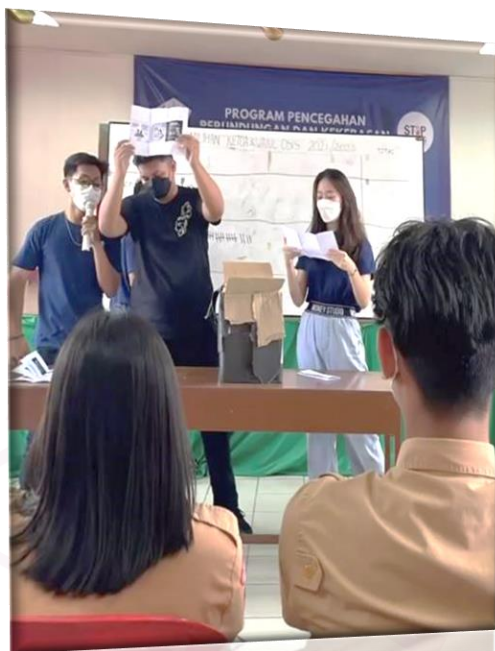
Namun, peristiwa berikutnya membuat Nida lega. Tuhan mengabulkan doanya. Pada 1 Februari 2022, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makariem meluncurkan Merdeka Belajar episode 15 bertajuk Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar. Kabar ini membuka mata pihak yayasan. Mereka berbalik arah mendukung Nida. Mereka bangga bahwa SMA Santa Patricia Tangerang, melalui tangan dingin Nida, telah menaklukkan seleksi ketat PSP dan menjadi bagian penting dalam program prioritas pemerintah.

“Saya mendapatkan izin dari Yayasan untuk mendaftar PSP, tapi ternyata beliau tidak paham perubahan kurikulum inti. Saya sudah minta berkali-kali ke BPMP Banten untuk memberi tahu Yayasan tentang esensi Kurikulum Merdeka, tapi tidak terlaksana karena Yayasan tidak mengerti ini mau dibawa ke mana,” kenang Nida.

Nida kemudian dipanggil oleh pihak Yayasan. Ia diminta menyerahkan SK yang menyatakannya lulus PSP. Berikutnya peristiwa di Maret 2022 itu menjadi sulit terlupakan: Yayasan memberikan penghargaan kepadanya. Nida akhirnya bisa bernapas lega.

Awalnya, Nida tidak begitu paham tentang PSP. Yang diketahuinya PSP mengusung perubahan pembelajaran dengan paradigma baru. Ia ingin menguji diri saja. Ikut tes seleksi PSP. Seandainya lolos seleksi, ia belum tahu harus berbuat apa dan sekolahnya mau dibawa ke mana.

Ya, ia ikut-ikutan saja. Gagal pun tak membuatnya kecewa. Saat tes, pertanyaan asesor tentang perubahan yang akan dilakukan dijawab santai oleh Nida, “Memberikan yang terbaik untuk sekolah.” Tak disangka, ia lolos seleksi.



Gambar 28. Proyek 2 bertema Suara Demokrasi berupa pemilihan Ketua OSIS.

Perjalanan waktu membuatnya semakin paham tentang esensi dan tujuan PSP. Pelatihan dan pendampingan oleh Pelatih Ahli membuka matanya. Pembelajaran berdiferensiasi. Guru mengikuti gaya belajar siswa dan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Hal-hal baru mulai memenuhi memorinya. Ia semakin jatuh cinta pada PSP.

Namun tak semuanya mudah dijalani. Perlu usaha ekstra menerapkan kolaborasi pembelajaran.

Mengolaborasikan suatu mata pelajaran dengan akhir proyek berupa internalisasi dimensi-dimensi dalam Profil Pelajar Pancasila bukan perkara mudah. Bukan pula bertujuan angka semata seperti pembelajaran sebelumnya.

Selama pelaksanaan PSP, banyak hal positif yang dirasa Nida terjadi di sekolah. *Pertama*, pola pikir (*mindset*) guru berubah. Pembelajaran kini disesuaikan dengan minat, bakat, dan karakter siswa melalui pembelajaran berdiferensiasi. *Kedua*, guru lebih melek digital. Segudang pembelajaran daring di *Youtube* dan bantuan perangkat elektronik PSP membuat guru intens berinteraksi dengan gawai.

Guru kini berfokus pada proses. Benar-benar memperhatikan karakter siswa. "Sebelumnya tidak terlihat. Misalnya, dulu untuk membuat karangan deskripsi, semua siswa harus menulis menggunakan kertas folio. Sekarang diberikan kebebasan kepada anak untuk mengerjakan tugas," ujar Nida. Siswa dapat menyelesaikan tugas dengan menulis, bercerita, atau presentasi sesuai dengan kemampuan mereka.

Memang tidak mudah sampai ke titik itu. Awalnya tidak semua guru menerima perubahan yang dibawa Nida. Ia berulang kali mengingatkan mereka tentang filosofi Ki Hadjar Dewantara bahwa anak lahir dan tumbuh-kembang sesuai dengan minat dan bakatnya. "Lambat laun kita semua termasuk saya mampu memahami makna pembelajaran di kelas seperti apa." Penguatan melalui Komite Pembelajaran dijadwalkan sekali sebulan, tetapi evaluasi pembelajaran kadang dilakukan sekali seminggu. Bagi Nida, perubahan butuh proses. Tidak mudah mengubah pola pikir.

Ia percaya penguatan dan pendampingan intens akan berbuah baik. Pelaksanaan tutor sebaya membuat proses perubahan terus terjaga karena semua guru bisa saling mengisi.



Gambar 29. Pengembangan diri

PERUBAHAN di kalangan siswa juga butuh proses. Penggabungan mata pelajaran IPA dan IPS menjadi IPAS membuat mereka linglung. Pelajaran terasa berat dan membebani. Terlebih guru masih terus belajar dan tidak memiliki contoh dari pendahulu. Maklum, mereka pelaksana PSP angkatan ke-1



Gambar 30. Kegiatan evaluasi dan refleksi guru

Namun, alah bisa karena biasa. Tak ada yang sukar jika biasa dilakukan. Mulai proyek ke-2 dan ke-3, guru mulai menerapkan polapembelajaran menyenangkan dan siswa tampak sangat menikmati. "Siswa sangat mengapresiasi dengan model pembelajaran yang ada di P5. Tidak 'mabuk' lagi," jelas Nida.

Selebrasi, program unggulan yang digelar usai pelaksanaan proyek sebanyak dua kali per semester, berjalan atraktif. Selebrasi berupa pesta

pertunjukan karya terbaik siswa hasil pembelajaran tematis dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Tampak jelas kreativitas dan rasa percaya diri siswa tampil di depan umum, tumbuh dan berkembang.

Selebrasi pada 10 November 2022 lampau, misalnya, berisi pesta pertunjukan bertema produk khas nusantara. Ada pentas seni berupa tari-tarian dan lagu daerah serta masakan nusantara. "Mereka mempresentasikan di depan para guru, orang tua, Yayasan, dan teman-temannya," ungkap Nida. Siswa tidak sekadar memasak sebuah menu khas daerah, melainkan juga bercerita tentang alasan pemilihan, bahan dasar, dan sejarah di balik makanan itu. Kegiatan yang digelar dua kali persemester ini berdampak baik pada peserta didik. Siswa menjadi terlatih.

Dalam rangka peningkatan literasi dan numerasi, digelar Patricia Senang Membaca (Pasema). Acara digelar tiap pagi, Senin-Jumat, pukul 07.15–07.30 WIB. Dua siswa dan seorang guru berkumpul di sentral suara yang berada di ruang kepala sekolah.



Gambar 31. Kegiatan siswa membaca buku di sudut baca kelas

Siswa pertama membacakan buku yang diminatinya. Tema bebas. Siswa kedua membaca Alkitab. Guru memandu kegiatan, menyampaikan renungan dari Alkitab yang dibacakan oleh siswa ke-2, dan berdoa. Melalui kegiatan ini, Nida ingin menguatkan minat siswa pada kegiatan membaca sekaligus

menyebarkan atmosfer religi di lingkungan sekolah. Pada tahun ke-2 PSP, dikembangkan model sudut baca, yaitu rak buku di setiap kelas berisi buku fiksi, ilmiah, dan tema-tema yang disukai siswa.

Kini, Nida tak hanya mencurahkan waktunya untuk kemajuan sekolah. Ia harus membagi waktu untuk menularkan pengalaman baiknya kepada sekolah lain di sekitarnya. Kadang mereka bertanya melalui sambungan telepon dan tak sedikit yang berkunjung ke sekolahnya.

Nida tak lagi stres. Ia kembali fokus mewujudkan impiannya yaitu menjadikan anak-anak didiknya manusia terbaik dan sekolah bisa berkembang sesuai tantangan zaman.

E. CERITA SITI DARI PULAU LEMBEH ⁵

Sekolah di tengah pulau juga berhak menjadi pelaksana Program Sekolah Penggerak.

Kerja keras Siti mengubah mindset guru dan orang tua menghasilkan perubahan berarti bagi peserta didiknya.

PULAU Lembeh, sebelah tenggara Kota Bitung, Sulawesi Utara. Hampir tengah malam di awal Maret 2021. Siti Aisa Ta'nang menatap layar laptopnya dengan perasaan cemas. Satu jam lagi tenggat pengiriman esai berakhir. Lewat sedikit saja, ia gagal mengikuti seleksi Program Sekolah Penggerak angkatan ke-1. Di seberang pulau, Hofni Timpaleng, pegawai Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, setia membimbingnya.



Gambar 32. Mengajarkan siswa cara merangkai bunga di kelas tunagrahita.

Sudah enam hari lima malam Siti menginap di sekolahnya, SLB Trikora Indah. Delapan soal esai telah rampung la tulis. Butuh usaha keras menyelesaikan delapan esai tersebut di sela kesibukan mengurus sekolah. Ia mengerjakan esai di sore hari, usai jam pembelajaran berakhir. Mengerjakan esai di rumah terasa tidak efektif karena harus membagi perhatian dengan anak-anaknya.

Siti teringat ucapan Febry H.J. Dien, Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Utara, tentang hadiah bagi kepala sekolah yang paling cepat menjawab soal esai. Mengingat janji itu, semangat Siti kembali menggebu. Tak ada pilihan lain selain menyelesaikan kerja-kerja yang telah susah payah dilakukannya. Di sini, di ruangan berukuran 6x9 meter, Siti merajut mimpi-mimpinya.

Usai tes esai, Siti menjalani tes skolastik. Dua tes ini sudah membuat Siti panas-dingin. Ketika ia membaca kiriman *Whatsapp* tentang tahap selanjutnya yaitu tes mengajar, asam lambung Siti langsung naik. Lalu ia jatuh sakit. "Aduh, banyak sekali yang harus saya lalui," keluhnya.

Karena memori (RAM) ponselnya kecil dan sinyal internet di Pulau Lembah tidak bagus-bagus amat, komunikasi melalui layanan seluler agak terganggu. Ia minta dibelikan ponsel baru kepada suaminya. Tentu dengan spesifikasi RAM yang lebih tinggi.



Gambar 33. Kegiatan Pembelajaran di halaman sekolah.

Tes mengajar tiba tetapi Siti dilanda kecemasan. Ia tidak bisa langsung terhubung dengan asesor. Operator mengganti kata sandi. Malu kalau hadir terlambat di ruangan (maya) tes. Ia pernah struk ringan dan khawatir akan terjadi lagi jika terus-terusan diterpa was-was dan cemas. Ia minta bantuan operator. Sepuluh menit berlalu, tes wawancara selesai. Siti berpikir tes benar-benar berakhir. Tinggal pengumuman seleksi PSP. Tak masalah kalau sekolahnya tak terpilih. Saat asesor menghubunginya dan berkata bahwa selanjutnya tes wawancara selama satu jam, keringat dingin menjalar di sekujur tubuhnya. “Waktu itu saya hampir pingsan,” kenangnya.

Tak ada air yang boleh diminum karena hari itu bulan Ramadan, puasa makan-minum bagi muslim. Ia berdoa kepada Tuhan agar bisa melewati hari dengan tenang. Siti sadar, ia sudah di tengah jalan dan tak boleh menengok ke belakang. Semua harus dijalani dengan baik. Asesor melakukan autentikasi esai yang ditulisnya, bertanya tentang pembelajaran semasa pandemi, dan ingin tahu kiat Siti andai jadi Kepala Sekolah Penggerak. Satu jam terasa begitu lama.

SITI sudah selangkah menggapai mimpinya. Menjadi Sekolah Penggerak adalah pilihan terbaiknya untuk melakukan perubahan komprehensif di sekolah. Tantangan pertamanya terletak pada kapasitas guru. Dari enam guru yang mengabdikan, tak satupun di antara mereka pernah mengikuti pendidikan khusus. Mereka berlatar belakang guru SD, pendeta, dan psikologi. Sejak awal ia menekankan kepada mereka agar mendasarkan rasa cinta dan kasih



Gambar 34. Pameran Proyek Profil Pelajar Pancasila yang diikuti oleh semua sekolah penggerak di Sulawesi Utara, dalam rangka Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2022.

sayang saat berinteraksi dengan peserta didik.

“Kalau anak SLB, sekali dicubit akan dikenang seumur hidupnya. Maka, mengajarnya harus dibarengi dengan pelukan dan kasih sayang seperti anak sendiri.”

Masa berikutnya adalah kegiatan belajar bersama. Siti mengikuti

sejumlah pelatihan PSP, begitu pula guru-gurunya. Tidak ada pertemuan luring. Bimtek daring sepuluh hari dijalani. Bertemu dengan rekan-rekan sejawat se-Indonesia di ruang maya.

Problem utama terletak pada pemanfaatan teknologi. Selama ini kegiatan pembelajaran berfokus pada pelayanan anak dan melupakan teknologi. Oleh karena itu, untuk mengembangkan penguasaan perangkat teknologi, Siti dan guru-guru mengadakan *In House Training* (IHT) pengembangan keterampilan. Kendati demikian, telah sama-sama disadari bahwa kekurangan sarana prasarana tidak menjadi penghalang kemajuan, justru menjadi kekuatan untuk berbuat lebih baik. Lambat laun kemajuan guru dalam pemanfaatan perangkat teknologi semakin meningkat. Jika dulu banyak menggunakan buku, kini laptop jadi perangkat pendukung dalam tiap kegiatan pembelajaran. Siti bersyukur karena sudah berjalan bersama guru-gurunya sampai di titik ini.

Sekian lama berjalan, lelah dan jenuh menghampiri para guru. Siti berusaha memotivasi mereka. “Kalau mengeluh, maka kita akan menemui banyak hambatan,” ujarnya pada mereka. Bukannya senang, mereka malah kesal mendengar motivasinya.



Gambar 35. Kegiatan pramuka

Merasa frustrasi dengan kondisi tersebut, Siti menemui Hartje Samola, pengawas sekolah, dan melepaskan curahan hati (curhat) kepadanya. “Pak, saya mendapat kendala. Guru-guru ada yang rajin dan malas,” ucapnya kepada mantan kepala sekolah itu.

"Bu, kita jalani saja semuanya dengan tenang dan ikhlas," ujar Hartje. Ia meminta Siti agar tidak usah banyak memikirkan keluhan guru. Kalau kalian mengeluh, kata Hartje, lebih baik berhenti mengajar di SLB. Nasihat Hartje membuat hati Siti tenang. Ia kemudian mengajak para guru untuk berefleksi, mengingatkan diri bahwa proses panjang yang dijalani dalam PSP bertujuan agar kualitas sekolah bertambah maju.

Mengubah Mindset Orang Tua

SELAIN mengubah pola pikir (*mindset*) guru, hal yang terus berlanjut dilakukan Siti adalah mengubah pola pikir orang tua siswa. Siti melihat sebagian orang tua tidak peduli dengan keadaan anaknya. Mereka bahkan menyerahkan anaknya kepada Siti sehingga di sekolah guru-guru memasak dan makan dengan mereka. "*Mindset* orang tua, buat apa anak-anak seperti ini sekolah?"



Gambar 36. Siti Aisa Ta'nang

Orang tua pun, yang rata-rata berprofesi sebagai buruh kasar dan nelayan, tidak mau mengantar dan menjemput anaknya ke sekolah. Tak jarang Siti berangkat bersama peserta didiknya ke sekolah, menempuh perjalanan Bitung-Pulau Lembeh dengan naik ojek, disambung menyeberangi Selat Lembeh naik perahu, dan disambung naik ojek menyusuri dua kampung di Kecamatan Lembeh Selatan.

Kadang di atas perahu mereka berjejalan dengan warga dan kendaraan roda dua. Perjalanan 30 menit yang penuh suka duka.

Setelah PSP berjalan, perlahan pandangan masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus dan pentingnya terlibat dalam pengelolaan sekolah berubah. Terlebih ketika tahu anak-anak itu menuai prestasi. "Pandangan itu mulai berubah saat tahu anak-anak bisa berprestasi dalam sejumlah ajang lomba, mulai tingkat lokal hingga nasional."

Perubahan di SLB Trikora Indah mulai tampak. Kegiatan pembelajaran terasa menyenangkan. Sebagian kegiatan pembelajaran ditopang oleh pemanfaatan perangkat teknologi: 5 laptop Chrome Book, 5 *notebook*, *scanner*, proyektor, modem, dan *printer*. Guru-guru mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi kepada 45 siswa dengan keistimewaan tunadaksa, tunarungu, tuna grahita, dan autis. Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional SLB PSP angkatan ke-1 tahun 2022, SLB Trikora Indah mengikuti pameran hasil pelaksanaan PSP.

Siti tak lagi mencemaskan asam lambungnya. Ia hanya berfokus mewujudkan mimpi untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman belajar bagi anak-anak didiknya. Memang, kini mereka masih belajar berlantai coran dan beratap terpal. Namun ia yakin, suatu hari nanti, mereka akan belajar di kelas yang nyaman dengan fasilitas modern.

A large, thick pink rectangular frame is centered on the page. It is open on the top and bottom sides, with the top bar missing and the bottom bar also missing, leaving only the left and right vertical bars.

BAGIAN IV

POTRET TRANSFORMASI SEKOLAH PENGGERAK

**PERJALANAN TRANSFORMASI PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK
ANGKATAN KESATU TAHUN PERTAMA**

POTRET TRANSFORMASI SEKOLAH PENGGERAK

IV

AKHIR tahun 2022 ini, PSP telah berjalan satu tahun lebih. Pada angkatan ke-1 PSP, terdapat 2.492 sekolah, yang terdiri dari 343 jenjang PAUD, 1.112 SD, 573 SMP, 383 SMA, dan 81 SLB.

Semua AngkatanAngkatan 1Angkatan 2Angkatan 3

PAUD343

SD1.112

SMP573

SMA383

SLB81

TOTAL2.492

Untuk melihat transformasi sekolah, beberapa sekolah yang menjalankan PSP telah mengirimkan video dan testimoni kepada Ditjen PAUD Dikdas Dikmen, melalui Direktorat PAUD, Direktorat SD, Direktorat SMP, Direktorat SMA, dan Direktorat PMPK.

A. TRANSFORMASI PENDIDIKAN DI PAUD

Usaha Henny Mentransformasi Paradigma Mengajar Guru Berbuah Manis

HENNY Maria Heng, Kepala TK Kristen Immanuel, Pontianak, Kalimantan Barat, mengaku bahwa tidak mudah melakukan transformasi paradigma mengajar para guru dari *berpusat pada guru* menjadi *berpusat pada murid*.

Pasalnya, guru-guru TK Kristen Immanuel sudah terlanjur memahami bahwa tugas seorang guru adalah mentransfer ilmu, menentukan segala macam pembelajaran di kelas, yang sama untuk semua anak.



Gambar 37. Henny Maria Heng

"Tantangan guru-guru TK Kristen Immanuel masih melakukan pembelajaran lama, yang kaku dan berpusat pada guru itu sendiri, sulit memberikan ruang dan kesempatan untuk anak mengembangkannya serta mengeksplorasi dirinya. Ini merupakan tantangan besar ketika para guru harus dituntut menjalankan pembelajaran yang berpusat pada anak," ceritanya pada video yang dikirimkan kepada Direktorat PAUD.

Melihat kondisi tersebut, Henny Maria segera melakukan langkah-langkah perubahan, terutama setelah mengikuti pelatihan PSP. "Maka perlu adanya transformasi *mindset* guru, mengenai pembelajaran yang berpusat pada anak," ujarnya dalam video.

Ada empat langkah yang dilakukan Henny Maria. *Pertama, briefing* pagi, di mana sebelum memulai kegiatan pembelajaran, semua guru akan berkumpul untuk melakukan doa dan devosi bersama, dilanjutkan dengan *briefing* singkat dari Kepala TK untuk memulai kegiatan pembelajaran.

Kedua, evaluasi, di mana semua guru akan berkumpul untuk mengadakan evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan pada hari itu.



Gambar 37. Kegiatan Belajar di TK Kristen Immanuel, Pontianak, Kalimantan Barat.

Ketiga, membaca, meringkas, dan mempresentasikan hasil ringkasan buku. "Sebuah *quote* yang ditulis oleh Armin Martajasa bahwa *Jika kamu ingin mengenal dunia, membacalah. Jika kamu ingin dikenal dunia, menulislah*, sangat menginspirasi saya sebagai kepala TK untuk memotivasi diri sendiri dan guru-guru untuk mulai membiasakan diri membaca dan menulis," ujarnya.

Keempat, guru membuat refleksi tentang pengalaman mengimplementasikan kurikulum merdeka secara tertulis, tentang apa yang mereka rasakan dan alami ketika pembelajaran yang mereka lakukan berpusat pada anak.

Dari keempat langkah tersebut, Henny Maria melihat ada perubahan, seperti kerja sama dan kolaborasi antar guru dalam mempersiapkan dan merencanakan pembelajaran. Para guru juga belajar bersama dalam

membuat media digital seperti *game* interaktif. Dari sini, ia melihat pembelajaran mulai berpusat pada murid, sedangkan guru berperan sebagai penuntun, pendamping, pendorong, dan pemberi fasilitas untuk anak didiknya agar memperoleh pengalaman belajar secara menyenangkan dan bermakna.

"Hal ini juga dirasakan oleh orang tua murid, karena aktivitas-aktivitas yang disiapkan guru membuat anak-anak mereka semakin kreatif dan bernalar kritis," pungkas Henny Maria.

Mengubah Perencanaan Berbasis Keinginan Menjadi Kebutuhan



Gambar 38. Nadrah

NADRAH, Kepala PAUD Terpadu Negeri Assyifa, Pandeglang, Banten merasakan banyak manfaat dari PSP. Salah satunya adalah manfaat Perencanaan Berbasis Data (PBD), yang berhasil mengubah paradigma perencanaan sekolah dari *perencanaan berbasis keinginan* menjadi *perencanaan berbasis kebutuhan*. Terkait hal ini, Nadrah mencontohkan, bahwa dulu penyusunan RKT

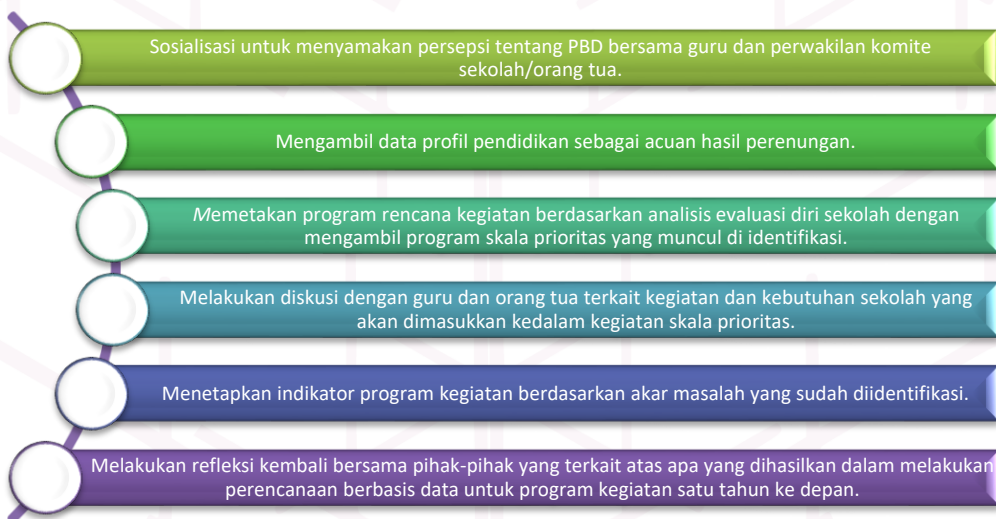
PAUD Assyifa masih sarat berisi keinginan kepala sekolah maupun guru, seperti pengadaan APE *indoor* maupun *outdoor*. Padahal hal ini tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Selain hal tersebut, ada sejumlah tantangan lainnya seperti perencanaan terpaku pada pengadaan sarana dan prasarana, program

sekolah hanya yang membutuhkan dana, penyusunan RKT/RKAS masih diserahkan kepada kepala sekolah, kurang memahami skala prioritas dalam RKT/RKAS, kurang mampu menganalisis akar masalah, dan sering mencontoh lembaga lain padahal lingkungan dan karakteristiknya berbeda.

“Namun, seiring perjalanan waktu, terutama setelah PAUD Assyifa mengikuti PSP, terjadi perubahan persepsi sedikit demi sedikit,” ujar Nadrah dalam video yang diterima Direktorat PAUD.

Nadrah melanjutkan bahwa untuk mengatasi sejumlah tantangan yang dihadapi lembaganya, ia bersama pendidik dan orang tua (perwakilan komite) melakukan musyawarah terkait penyusunan program kegiatan sekolah untuk jangka waktu satu tahun ke depan.



Ada enam aksi. *Pertama*, sosialisasi untuk menyamakan persepsi tentang PBD bersama guru dan perwakilan komite sekolah/orang tua. *Kedua*, mengambil data profil pendidikan sebagai acuan hasil perenungan. *Ketiga*, memetakan program rencana kegiatan berdasar-

kan analisis evaluasi diri sekolah dengan mengambil program skala prioritas yang muncul diidentifikasi.

Keempat, melakukan diskusi dengan guru dan orang tua terkait kegiatan dan kebutuhan sekolah yang akan dimasukkan ke dalam kegiatan skala prioritas. *Kelima*, menetapkan indikator program kegiatan berdasarkan akar masalah yang sudah diidentifikasi. *Keenam*, melakukan refleksi kembali bersama pihak-pihak yang terkait apa yang dihasilkan dalam melakukan perencanaan berbasis data untuk program kegiatan satu tahun ke depan. Berdasarkan langkah-langkah di atas, ada delapan kemajuan pada PAUD Assyifa.



Gambar 40. Suasana Rapat PBD di PAUD Terpadu Negeri Assyifa, Pandeglang, Banten

Pertama, penyusunan RKT melalui proses PBD, ternyata berbeda dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam menentukan kegiatan yang akan dilakukan satu tahun ke depan.

Kedua, dalam PBD terdapat indikator prioritas yang harus diperhatikan dan didahulukan pemenuhannya oleh satuan, sehingga dapat menuju

PAUD berkualitas dan bermutu.

Ketiga, melalui proses refleksi, satuan memahami akar masalah yang dihadapi sebagai hal-hal mendasar yang harus dilakukan pembenahan. Pendidik dan tenaga kependidikan lebih terbuka mengemukakan kebutuhan yang urgen dan kebutuhan yang tidak urgen, sehingga sarana prasarana atau kegiatan dapat lebih bermanfaat dan lebih maksimal dalam pelaksanaannya.

Keempat, penyusunan akar masalah menjadikan RKT sesuai dengan kebutuhan dan bukan keinginan.

Kelima, uji coba pengisian Lembar PBD, membuat perencanaan lebih terarah.

Keenam, melalui identifikasi, refleksi, dan benahi, PAUD Assyifa dapat memahami bahwa penggunaan anggaran tidak harus untuk membeli sarana prasarana saja, tapi dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan internal satuan, misalnya untuk peningkatan belajar bersama dalam menguatkan kualitas perencanaan pembelajaran atau mengikuti pelatihan di Platform Merdeka Mengajar.

Ketujuh, melalui PBD, PAUD Assyifa merasakan banyak manfaat seperti budaya refleksi dalam menyusun RKT dan RKAS, meningkatkan kesiapan PAUD dalam implementasi anggaran dan pertanggungjawabannya secara akuntabel di akhir tahun, dan meningkatkan kesiapan PAUD dalam proses akreditasi lembaga.

Kedelapan, orang tua murid lebih antusias karena terlibat dalam penyusunan program sekolah, sehingga mereka dapat menyampaikan ide dan pendapatnya terkait program apa yang akan dilaksanakan selanjutnya," pungkasnya.

B. TRANSFORMASI PENDIDIKAN DI SD

Mengubah Pusat Pembelajaran ke Murid



Gambar 42. Aam Azimah

SALAH satu transformasi sekolah yang terjadi pada SDN Total Persada Kota Tangerang adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Hal ini sebagaimana disampaikan Aam Azimah, Kepala Sekolah SDN Total Persada. Menurutnya, kondisi awal pembelajaran hanya berpusat

pada guru dan sumber belajarnya hanya buku paket. Sehingga pemahaman siswa tergantung pada luasnya wawasan guru. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan PSP.

Mengatasi hal tersebut, ia memperoleh fasilitasi peningkatan kompetensi guru dari BPMP Banten.

"Alhamdulillah BPMP memfasilitasi peningkatan kompetensi guru dalam kegiatan pembelajaran bernalar kritis dan berbasis TIK dengan perwakilan satu orang guru dari sekolah kami, yang selanjutnya mengimbaskan kepada seluruh guru di SDN Total Persada. Dari situ, pembelajaran lebih pada menggali kompetensi siswa untuk bernalar kritis melalui pemanfaatan sarana TIK yang tersedia di sekolah," katanya, 19 Oktober 2022.

Sebagai Kepala Sekolah Penggerak, Aam Azimah terus berupaya

membuat perubahan di sekolahnya. Ia mulai menerapkan Perencanaan Berbasis Data (PBD), di mana ia dan para guru melakukan analisis Rapor Pendidikan tahun sebelumnya, didampingi pelatih ahli atau fasilitator dalam kegiatan PMO.

"Kami membuat rekomendasi solusi rencana perbaikan untuk beberapa capaian rapor pendidikan yang masih perlu ditingkatkan. Kemudian menentukan prioritas solusi berdasarkan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan kekuatan sekolah berdasarkan hasil identifikasi lingkungan sekolah," kata Aam Azimah.

Kedua, melakukan perencanaan program sekolah, dengan membentuk tim pengembang TPMPs (Tim Penjaminan Mutu Sekolah), Tim Pengembang Kurikulum, dan Tim Fasilitasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Tim yang terlibat adalah pengawas, kepala sekolah, orang tua siswa atau komite, dan guru. Semua tim terlibat dalam membuat analisis konteks, program kerja sekolah, serta KOSP.

"*Ketiga*, kami melaksanakan sosialisasi program sekolah kepada seluruh warga sekolah termasuk orang tua siswa dan siswa. Dan yang *keempat* adalah pelaksanaan program kegiatan sekolah, di antaranya peningkatan kompetensi literasi dan numerasi serta pembentukan karakter siswa dengan berbagai pengembangan diri," ujar Aam penuh semangat.

Selain itu, Aam Azimah juga melaksanakan pembelajaran paradigma baru dengan pemanfaatan sumber daya sekolah, dan peningkatan kompetensi guru melalui *workshop*.

"Pesan yang ingin saya sampaikan bagi para guru di Indonesia teruslah bersemangat, tetap berpikir positif dan bertindak optimis, gali kompetensi berdasarkan 7 aset sekolah untuk mewujudkan sekolah idaman," tutupnya.

Guru di Sekolah SD Negeri 26 Banda Aceh Makin Antusias

SETELAH terpilih sebagai sekolah penggerak, Tihabsah, Kepala Sekolah SD Negeri 26 Banda Aceh, mengaku bahwa ada banyak perubahan pada guru-guru di sekolah yang ia pimpin.



"Saya lihat guru-guru di sini antusias sekali. Mau di hari Jumat atau lainnya, mereka senang berlama-lama di sekolah. Enggak pulang dulu, dan ingin menyelesaikan tugas," ujar Tihabsah

Gambar 43. Tihabsah

Salah satu antusiasme guru SD Negeri 26 Banda Aceh tergambar dalam aktivitas mengakses Platform Merdeka Mengajar (PMM), di mana mereka belajar, berkarya dan berbagi.

Menurut Tihabsah, antusiasme para guru dalam mengajar tak lepas dari paradigma PSP. "Lebih terprogram dan terarah," ujarnya.

Tihabsah menambahkan bahwa para guru SD Negeri 26 Banda Aceh juga tak gampang mengeluh saat menjalankan tugas. "Enggak mengeluh, saya lihat enggak ada. Bahkan mereka terlihat asyik dalam mengajar," ungkapnya.

Pengakuan Tihabsah itu diamini oleh salah satu guru SD Negeri 26 Banda Aceh, yaitu Syarifah Sarwani. Menurut guru kelas IV SD Negeri 26 Banda Aceh ini, pembelajaran dalam PSP menantang. Ia mencontohkan dalam

pembelajaran berdiferensiasi.

“Anak itu, gaya belajarnya berbeda-beda. Gaya berbicaranya juga. Jadi, kami bisa melihat apakah anak tersebut menyukai gaya belajar yang audio atau visual? Ada juga yang hiperaktif, tidak bisa duduk, jalan-jalan terus. Jadi kita sebagai guru itu harus memberikan materi sesuai dengan gaya belajar anak tersebut. Yang kami lakukan selama ini adalah diagnosis awal,” ujar Syarifah.

Diagnosis awal yang dilakukan Syarifah tidak terpaku pada satu cara. “Kita bisa melakukan asesmen apa pun dalam bentuk portofolio seperti itu ataupun dalam bentuk wawancara atau yang lainnya. Jadi di sini kita bisa melihat anak tersebut kira-kira sesuai dengan apa yang dia mau seperti itu. Belajarnya juga tidak monoton,” tambahnya.

Dalam memberikan pembelajaran terhadap anak didiknya tersebut, saat ini Syarifah banyak terbantu. “Saat ini kan, ada digitalisasi sekolah, seperti infokus, proyektor, dan *speaker*. Kita bisa maksimalkan, misalnya dengan game pembelajaran. Jadi anak (yang hiperaktif, pen.) akan tertarik,” cerita Syarifah.

Sementara itu, Tihabsah menambahkan bahwa SD Negeri 26 Banda Aceh juga rutin melaksanakan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Tihabsah mencontohkan proyek gaya hidup berkelanjutan berupa pemanfaatan sampah. “Caranya, anak-anak dibawa ke tempat penumpukan sampah. Mereka melihat langsung tempat tersebut, mewawancarai orang yang ada di sana, bagaimana bisa sampah ada di sana, dan bagaimana daur ulangnya?” cerita Tihabsah.

Selain daur ulang sampah, Tihabsah beserta para guru di SD Negeri 26 Banda Aceh juga mengajarkan tentang pemanfaatan tutup botol menjadi sesuatu yang bermanfaat. “Nanti dipamerkan di akhir semester,” tutupnya

C. TRANSFORMASI PENDIDIKAN DI SMP

Pembelajaran Paradigma Baru di SMPN 1 Jogonalan



Gambar 44. Sofi Sofia Fitriani

PAGI itu, Sofi Sofia Fitriani, Guru Matematika SMPN 1 Jogonalan, menyapa para siswa di kelas.

"Selamat pagi anak-anak?"

"Selamat pagi, bu."

Selanjutnya, ia bertanya tentang murid yang tidak masuk kelas, dan diketahui ada beberapa murid yang sakit. Kemudian, ia menunjuk salah satu murid untuk maju ke kelas, memimpin doa bersama. "Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan melakukan kesepakatan kelas," ujar guru yang akrab disapa Sofi ini, seraya menunjuk layar proyektor yang ada di depan para murid. "Anak-anak dapat menambahkan poin-poin kesepakatan," tambahnya.

Salah satu murid mengangkat tangan. "Bersikap aktif saat

pembelajaran,” ujar si murid.

“Apakah anak-anak lainnya setuju?” tanya Sofi

“Setuju.”

Setelah poin-poin kesepakatan disetujui, Sofi melanjutkan sesi berikutnya yaitu Tes Diagnostik Non Kognitif. Di sini Sofi meminta murid-muridnya untuk menuliskan perasaannya, seraya membagikan *post it*.

“Yang sedang senang, tulis senang. Sedang sedih, tulis sedih, dan yang sedang marah tulis marah,” ujar Sofi.

Tak lama kemudian para murid menuliskan perasaannya dalam *post it* yang telah dibagikan. Dari beberapa *post it* yang ditempelkan di *dashboard* itu, diketahui bahwa ada murid yang bahagia karena pagi tadi telah sarapan nasi goreng yang enak, dan lainnya. Tak lupa, Sofi menjelaskan tentang alasannya meminta para murid menuliskan perasaannya pada *post it*.

Menurutnya, agar guru mengetahui kondisi psikologis para murid dan ada kesadaran diri mengelola perasaan selama pembelajaran.



Gambar 45. Pembelajaran Paradigma Baru berhasil memantik semangat siswa

Pada sesi selanjutnya, Sofi melakukan Tes Diagnostik Kognitif. "Tujuannya adalah untuk mengetahui pengetahuan awal kalian tentang Konsep Bangun Ruang," ujar Sofi seraya membagikan kertas kerja ke masing-masing murid. Selanjutnya, Sofi mengajak para murid untuk menatap layar proyektor, dan menjelaskan dua pertanyaan. *Pertama*, menuliskan nama bangun ruang sesuai dengan nomornya. *Kedua*, menuliskan apa yang siswa ketahui dari bangun ruang tersebut (sifat dan rumus yang berlaku).

Setelah para murid selesai menjawab Tes Diagnostik Kognitif tentang Konsep Bangun Ruang, Sofi melanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu pembelajaran diferensiasi. Pada sesi ini, Sofi menayangkan video pada layar proyektor tentang Konsep Bangun Ruang.

Sesi berikutnya adalah Penilaian Formatif. Di sini Sofi membagi para murid dalam beberapa kelompok dan menyuruh mereka membuka buku paket yang telah dibagikan. "Silakan kalian pelajari dan diskusikan tentang materi yang telah saya tayangkan di depan," ujar Sofi. "Selama kalian

berdiskusi, kalian boleh mengambil sumber belajar dari mana pun,” tambahnya. Instruksi Sofi tersebut langsung dikerjakan oleh para murid. Ada yang membuka buku paket, ada juga yang mencari referensi dari internet via *smartphone*.

Untuk menambah keseruan dalam pembelajaran, Sofi menayangkan Media *Quiz*. Nampak para murid sangat antusias mengikutinya. Mereka berlomba-lomba memberikan jawaban dari *smartphone* masing-masing. Beberapa saat kemudian, Sofi menayangkan hasil kuis.

Sebelum mengakhiri pembelajaran, Sofi mengajak para murid untuk melakukan refleksi bersama tentang pembelajaran yang telah diikuti bersama. Ia meminta para murid untuk menyampaikan pendapatnya pada *post it*.

Salah satu murid menyampaikan pendapat bahwa pembelajaran hari ini sangat seru. Bu Sofi memberikan beberapa materi yang cukup mudah. Apalagi ditambah dengan kuis, langsung seperti *boom*. Ada juga yang menulis pembelajarannya menyenangkan.

Endah Sulistyowati, Kepala Sekolah SMPN 1 Jogonalan mengatakan bahwa pembelajaran paradigma baru adalah bagaimana seorang guru sebagai pemimpin pelajaran melayani siswa sesuai kemampuannya untuk membentuk Profil Pelajar Pancasila. “Adapun caranya adalah yang pertama guru harus menyusun tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi kelasnya,” katanya pada video *youtube* yang diunggah akun SMPN 1 Jogonalan pada 24 Maret 2022.

“Kurikulum ini sangat baik, mari kita coba dengan pembelajaran dengan paradigma baru,” tambahnya, dan diikuti dengan pembelajaran yang diampu Guru Sofi di atas.

Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila



Gambar 46. Ani Yuniati

PROYEK penguatan Profil Pelajar Pancasila merupakan kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dilaksanakan dalam berbagai aktivitas berbasis proyek sebagai unit pembelajaran terintegrasi sehingga tidak ada lagi sekatantar-mata pelajaran.

Ani Yuniati, Kepala Sekolah SMP N 12 Pekalongan mengatakan bahwa sebagai kepala sekolah penggerak, ia melaksanakan pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila. "Dalam sekolah penggerak ini pembelajaran dibagi dua yaitu intrakurikuler dan pembelajaran proyek," ujarnya dalam rekaman video yang diterima Direktorat SMP. Dalam pelaksanaan P5, Ani bercerita bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan proyek, ia beserta para guru melaksanakan rapat pembentukan tim proyek, yang membahas perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga refleksi proyek. Ada juga *workshop* yang berisi materi pementasan drama dengan judul Kalongan Duwe Crito, yang dipaparkan oleh Suci Harsana dari Dewan Kesenian Kota Pekalongan. *Workshop* ini diikuti para guru yang menjadi pendamping proyek dan perwakilan murid kelas VII.

Setelah itu, para pendamping proyek dan murid-murid menuangkan ide dan gagasan dalam naskah drama, yang akan ditampilkan pada puncak

Gebyar Proyek Kearifan Lokal.

“Refleksi dari kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila adalah dapat meningkatkan perilaku gotong royong, nalar kritis, dan kreatif pada murid,” tegas Ani.

Selain pementasan drama, SMPN 12 Pekalongan juga melaksanakan proyek kewirausahaan. Di antara kegiatannya adalah pementasan tari dan musik. Pada pementasan tari, para siswa menggunakan aksesoris dari daun-daunan. Hal ini nampak terlihat pada pementasan tarian primitif, yang menggunakan hiasan kepala dari daun ketapang dan daun sukun untuk aksesoris dada. Sedangkan pada pementasan musik, sebagian alat musiknya berasal dari bahan-bahan bekas seperti timba bekas cat.

“Alhamdulillah, meski kegiatan proyek kami masih ada kekurangan, tetapi berhasil kami selesaikan dan saat ini merupakan puncak kegiatan,” tutup Ani.

D. TRANSFORMASI PENDIDIKAN DI SMA

P5 Asah Kreativitas dan Tumbuhkan Kebersamaan

PROYEK Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) merupakan kegiatan yang mampu mengasah kreativitas murid sekaligus menumbuhkan kebersamaan dan kegotongroyongan antar warga sekolah. Hal ini diakui M Fadli Akbar, murid SMA Muhammadiyah Al-Amin Sorong.

“Di hari sabtu kami mempunyai proyek. Itu yang saya sukai, karena di dalam proyek itu kita banyak belajar tentang kreativitas, gotong royong,

kebersamaan, rasa tanggung jawab, dan lain-lain,” ujar Fadli dalam sebuah video yang dikirimkan ke Direktorat SMA.

Sementara Fauzan Aziz, murid SMA Muhammadiyah Al-Amin Sorong menambahkan bahwa di hari Sabtu ia dan teman-temannya biasa melakukan P5, dan salah satunya adalah membuat pupuk kompos. “Setiap hari Sabtu kami mengadakan proyek membuat pupuk kompos, bahan-bahannya dari tumbuhan dan kotoran hewan yang ada di sekitar sekolah kami,” cerita Fauzan. “Yang saya dapat dari proyek tersebut adalah saya belajartentang gotong royong, kreatif dan tanggung jawab,” tambahnya.

Nurfin Moha, Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Al-Amin Kota Sorong, mengatakan bahwa untuk melaksanakan P5, lebih dulu ia membentuk Tim Proyek lewat rapat di awal tahun pelajaran. Setelah terbentuk Tim Proyek, lalu membuat jadwal rapat khusus untuk merancang proyek, proyek, menyusun modul ajar dan membuat rencana pelaksanaan proyek.

“Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) merupakan upaya untuk mendorong tercapainya Profil Pelajar Pancasila dengan menggunakan paradigma baru melalui pembelajaran berbasis proyek. Dengan menjalankan P5, guru diharapkan dapat menemani proses pembelajaran siswa untuk dapat menumbuhkan kapasitas dan membangun karakter luhur sebagaimana yang tertuang dalam Profil Pelajar Pancasila,” tulis Nurfin dalam sebuah paparan yang dikirimkan kepada Direktorat SMA.

Nurfin menambahkan bahwa ada tiga perubahan yang dirasakan sejak sekolahnya mengikuti PSP. *Pertama*, guru menjadi terbiasa berkolaborasi. *Kedua*, peserta didik menjadi terbiasa berkolaborasi, dan *ketiga*, peserta didik menjadi semakin bersemangat belajar di luarkelas.

Transformasi Pendidikan di SMAN 1 Karangmojo



Gambar 48. Siti Zumrotul Arifah

SITI Zumrotul Arifah, Kepala Sekolah SMAN 1 Karangmojo mengaku bahwa setelah mengikuti PSP, ada banyak transformasi yang positif di sekolahannya.

Siti bercerita, sebelum berpartisipasi dalam PSP Angkatan ke-1, pembelajaran masih banyak yang bersifat tradisional, belum memanfaatkan sarana dan lingkungan sekolah secara maksimal.

Metode pembelajaran yang dipakai juga belum bervariasi dan belum bisa memfasilitasi gaya belajar peserta didik. Sehingga, penilaiannya belum sesuai dengan karakteristik peserta didik. "Guru sudah melakukan tes diagnostik, tetapi belum terdokumentasi dengan baik dan belum ditindaklanjuti untuk proses pembelajaran. Tes diagnostik masih sebatas diagnostik kognitif saja, tes diagnostik non kognitif belum dilakukan. Pemberian tugas sama untuk semua peserta didik, belum dibedakan sesuai dengan gaya belajarnya," cerita Siti sebagaimana yang dikirimkan kepada Direktorat SMA.

Namun kemudian, kondisi di atas perlahan-lahan berubah. Terutama setelah SMAN 1 Karangmojo mengikuti PSP. Menurut Siti, setelah berpartisipasi dalam PSP, pembelajaran yang dilakukan oleh guru lebih bervariasi untuk bisa melayani peserta didik sesuai dengan karakteristik dan kemampuan peserta didik, termasuk dalam pemberian tugas. Pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Guru sudah memanfaatkan

lingkungan sekolah untuk pembelajaran.



Gambar 49. Siswa SMAN 1 Karangmojo melakukan kegiatan PSP

“Metode yang dipakai oleh guru juga bervariasi dengan memanfaatkan teknologi digital,” ujarnya.

Siti menambahkan bahwa warga SMAN 1 Karangmojo yang pada tahun pelajaran 2022/2023 memiliki 21 Rombel dengan 727 murid ini juga lebih bersemangat.

Terutama saat para guru memberi kesempatan peserta didik berpartisipasi lebih banyak, sehingga siswa aktif dalam belajar secara mandiri. Guru melaksanakan asesmen formatif, untuk perbaikan pembelajaran serta melakukan refleksi .

Selain itu, tambah Siti, kehadiran P5 sangat membantu siswa dalam mengasah kreativitas dan nilai-nilai yang melekat pada Profil Pelajar Pancasila.

“Apalagi ini sudah lintas mata pelajaran, berdasarkan tema, pemecahan masalah di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar,”katanya. Pada tahun pelajaran 2021/2022, ada tiga tema yang sudah dilaksanakan yaitu Kewirausahaan, Gaya Hidup Berkelanjutan, dan Bhineka Tunggal Ika. Kegiatannya disesuaikan dengan visi misi sekolah, kondisi sumber daya sekolah, dan slogan C2G Berbudi [(C=CLing (Cinta Lingkungan , C=Chat me (berkomunikasi/WA dll), G=Gesit (Gerakan Siap Tanggap), dan Berbudi=Bersih Berbudaya dan Berinovasi]

“Dengan adanya slogan tersebut maka kegiatan P5 yang dilaksanakan ada tujuannya ke arah *brand* tersebut,” jelasnya.

Siti memberi contoh pada tema Kewirausahaan, di mana kegiatannya adalah membuat proposal bisnis plan. Produknya yang ada dalam proposal tersebut lebih mengangkat kearifan lokal dan sumber daya alam di sekolah. Salah satunya adalah memanfaatkan daun jati sebagai produk unggulan, mengingat sekolah mempunyai area hutan jati mini. “Beberapa produknya antara lain *ecoprint*, kerupuk dari daun jati (jatilasaka=krupuk daun jati nilasaka), hiasan dari daun jati, dan produk unggulan lainnya. Setelah selesai membuat produk, diadakan panen karya atau pameran,” cerita Siti.

E. TRANSFORMASI PENDIDIKAN DI SLB

Pembelajaran Berdiferensiasi tentang Kewirausahaan



Gambar 50. Triyanti

WAJAH Triyanti, Kepala Sekolah SMALB Shanti Kosala Mastrip Kabupaten Nganjuk, tampak sumringah. Pasalnya, seiring penerapan pembelajaran berdiferensiasi tentang kewirausahaan di sekolahnya, saat ini para muridnya telah memiliki produk kewirausahaan yang beragam. Hal ini tentu menggembirakan dibandingkan kondisi sebelumnya.

"SMALB Shanti Kosala Mastrip di awal program belum memiliki produk yang beragam dengan hambatan yang dimiliki juga beragam," tulisnya dalam sebuah artikel berjudul *Deskripsi Praktik Baik PSP SLB*, yang dikirimkan ke Direktorat PMPK.

"Dari PSP, SMALB memberikan pemfokusan pada vokasional menjahit dasar yang pada akhirnya menjadi pokok keunggulan kompetensi yang akan ditingkatkan dalam produksi hasil karya siswa berkebutuhan khusus," tambahnya. Bahkan, dalam sebuah video yang ia kirimkan ke Direktorat PMPK, ia tak hanya memperkenalkan produk jahitan hasil karya muridnya. Namun juga produk lainnya seperti jilbab berkarakter, *shuttlecock* dengan metode menjahit, dan *shuttlecock* dengan metode lem. "Juga pembuatan tas belanja untuk mengurangi pemakaian tas kresek," ujarnya.

Dalam video yang diberikan Direktorat PMPK, tampak Nisa Permana Cahyati, Wali Kelas XII Tunarungu SMALB Shanti Kosala Mastrip sedang mendampingi salah



Gambar 51. Suasana belajar di SMALB Shanti Kosala Mastrip Kabupaten Nganjuk

satu muridnya bernama Yana, yang sedang menggambar sebuah pola yang akan digunakan untuk pengerjaan jilbab berkarakter. Bahan-bahan yang digunakan di antaranya adalah jilbab segi empat, karbon, cat air, pensil, wadah cat air, wadah air, air, dan pola/gambar.

Menurut Nisa, ada tiga kiat untuk warna tidak memudar pada produk jilbab berkarakter. *Pertama*, jilbab harus dicuci. *Kedua*, disetrika. *Ketiga*, jilbab yang telah diberi pola disetrika dengan alas kain kasa. "Setelah

disetrika, kita diamankan terlebih dahulu maksimal satu hari. Hari berikutnya baru kita bisa mencucinya,” ujarnya.



Gambar 52. Salah satu guru SMALB Shanti Kosala, Agus Trianto sedang mendampingi muridnya dalam kegiatan vokasi menjahit.

Selain Nisa, ada juga Agus Trianto yang sedang mendampingi salah satu Siswa tunarungu bernama Sulis dalam kegiatan vokasi menjahit. Ia mendampingi Sulis dengan menggunakan bahasa oral dan isyarat. Sementara Sulis mengikuti instruksi gurunya tersebut dengan cekatan. “Pagi ini kami mendapat capaian bahwa siswa dapat menjahit secara lurus,” ujar Agus.

Ada juga Lusiana Kusuma, guru SMALB Shanti Kosala Mastrip yang mendampingi para murid mengerjakan *shuttlecock*. Menurut Lusiana, pengerjaan *shuttlecock* dilakukan secara kolaboratif bersama para wali murid. Menurut Lusiana, aktivitas membuat *shuttlecock* ini sesuai dengan potensi di Kabupaten Nganjuk yang memiliki sentra-sentra pembuatan *shuttlecock*. “Kami melakukan kegiatan ini dengan melibatkan juga narasumber dan wali murid,” ujarnya.

P5 Mengubah Pandangan Minor Masyarakat Terhadap Pembelajaran ABK

SEBELUM mengikuti PSP, pembelajaran di SLB Suta Wijaya Gunungkidul masih berfokus pada bahan materi yang disiapkan oleh guru. Demikian disampaikan Suharni, Kepala Sekolah SLB Suta Wijaya Gunungkidul, kepada Direktorat PMPK.

Suharni menambahkan, bahwa masyarakat dan orang tua masih memandang bahwa pembelajaran yang diberikan kepada para murid hanya ada di dalam kelas. “Kalau di luar kelas, pandangan masyarakat dan orang tua, anak itu dibiarkan berkeliaran,” tulis Suharni, pada deskripsi Praktik Baik PSP yang diberikan kepada Direktorat PMPK.

Melihat kondisi itu, Suharni melakukan sosialisasi dan pendekatan persuasif kepada masyarakat dan orang tua murid. Ia mengenalkan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang merupakan bagian dari PSP.

Setelah itu, ia bekerja sama dengan berbagai pihak mulai yayasan, komite sekolah, orang tua, instansi pemerintah, dan donatur peduli pendidikan untuk melaksanakan P5.

Tak lupa, bersama para guru SLB Suta Wijaya Gunungkidul melakukan analisa kondisi dan karakteristik lingkungan sekitar untuk mengembangkan P5 yang bisa dilaksanakan di sekolah untuk menunjang keterampilan dan kemandirian siswa. Dari analisis itu ditemukan kebiasaan minum jamu warga dan lingkungan sekolah. Hal ini didukung dengan keberadaan berbagai tanaman empon-empon/jamu yang berada di sekitar sekolah.



Gambar 53. Pembelajaran di SLB Suta Wijaya Gunungkidul makin kreatif

Berangkat dari kondisi itu, akhirnya diputuskan untuk melaksanakan P5 berwawasan lingkungan dengan mengembangkan lahan kosong untuk pertanian empon-empon, jahe, sereh, kunir, temulawak, pandan wangi dan lainnya. Ada juga tanaman singkong dan sejenisnya.

"Ada tiga tema yaitu kebun apotek hidup, jamu instan siap sedu (jahe, kunir dan wedang uwuh), dan kedai jamu sebagai tempat belajar berwirausaha," tulisnya.

Beberapa waktu kemudian, P5 yang dilaksanakan di SLB Suta Wijaya Gunungkidul berbuah manis. Para murid mulai memahami cara bercocok tanam dan mengolah tanaman menjadi produk yang bermanfaat, dan perubahan pandangan masyarakat serta orang tua terhadap pembelajaran ABK. Mereka memandang P5 merupakan kegiatan yang positif bagi ABK.

"Pemahaman masyarakat dan orang tua tentang anak berkebutuhan khusus makin membaik," tulisnya.

A large, thin pink rectangular frame is centered on the page. It is open on the top and bottom sides, with the top and bottom bars being shorter than the left and right bars.

BAGIAN V

DINAMIKA

PERJALANAN TRANSFORMASI PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK
ANGKATAN KESATU TAHUN PERTAMA

PROGRAM Sekolah Penggerak (PSP) berjalan dinamis. Salah satunya terkait dengan perubahan Kepala Sekolah Penggerak (SP). Meskipun sejak awal Pemerintah Daerah dilarang melakukan perubahan dan penggantian Kepala SP, tetap saja hal tersebut terjadi dan tak dapat dihindari. Kondisi yang memungkinkan terjadinya perubahan Kepala SP antara lain, berhalangan tetap (meninggal dan sakit berkepanjangan), promosi jabatan, dan terlibat suatu kasus.

No.	JENJANG	SK PENETAPAN AWAL			SEKOLAH YANG DIBATALKAN			SK DIRJEN PERUBAHAN			
		PSP 1	PSP 2	PSP 3	PSP 1	PSP 2	PSP 3	PSP 1	PSP 2	PSP 3	Jml
1	PAUD	343	1.688	1.614	1	0	0	342	1.688	1.614	3.644
2	SD	1.116	3.091	1.849	4	19	0	1.112	3.072	1.849	6.033
3	SMP	574	1.244	1.170	1	15	0	573	1.229	1.170	2.972
4	SMA	382	631	312	2	2	1	380	629	311	1.320
5	SLB	85	125	55	0	1	0	85	124	55	264
Total		2.500	6.779	5.000	8	37	1	2.492	6742	4999	14.233

Catatan:

1. Data Per tanggal 19 Desember 2022
2. Rata-rata dinamika perubahan KS PSP di angkatan 1 dan 2 di 3,45%
3. Tindak lanjut rekon data dengan SIMPKB, Dapodik, HTK, BOSKIN, dan GTK PKP

Gambar 54. Perkembangan jumlah sekolah pelaksana PSP

Data di atas menunjukkan telah terjadi perubahan Kepala SP sebanyak 46 kali dan tersebar di PSP angkatan ke-1, ke-2, dan ke-3.

Artinya, jika dirata-rata, selama setahun pelaksanaan PSP, telah terjadi perubahan Kepala PSP sebanyak 3–4 kali tiap bulan.

Bagi Katman, Penanggung Jawab PMO PDM-01 yang menangani PSP, perubahan Kepala SP adalah keniscayaan. Maka, yang perlu diantisipasi adalah mekanisme dan persyaratan bagi pengganti Kepala SP. Keputusan Mendikbudristek Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak mengatur persyaratan bagi Kepala Sekolah pengganti:



Gambar 55. Persyaratan bagi Kepala Sekolah Pengganti

1. calon kepala satuan pendidikan pengganti merupakan kepala satuan pendidikan cadangan calon kepala sekolah penggerak;
2. apabila kepala satuan pendidikan cadangan calon kepala sekolah penggerak sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak ada, maka calon kepala sekolah penggerak dapat diganti dari guru penggerak;

3. apabila guru penggerak sebagaimana dimaksud pada angka 2) tidak ada, maka dapat diangkat plt. kepala satuan pendidikan dari unsur anggota komite pembelajaran pada sekolah yang bersangkutan sampai dengan ditetapkannya kepala satuan pendidikan definitif; dan
4. apabila kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 3) tidak dapat dipenuhi, maka calon kepala sekolah penggerak dapat diangkat dari kepala satuan pendidikan lain yang bukan sekolah penggerak sepanjang telah mengikuti pelatihan komite pembelajaran.

Untuk menangani hal tersebut, Kemendikbudristek bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah, melakukan dialog dengan para pemangku kepentingan. Dalam dialog dilakukan klarifikasi dan verifikasi dengan menghadirkan pihak-pihak yang terlibat. "Beberapa dari mereka mengubah keputusan. Yang tidak mengubah diterapkan sanksi di beberapa daerah," jelasnya.

Umumnya, Pemda beralasan penggantian dilakukan karena kepala sekolah tidak memenuhi kapasitas yang diharapkan. Motif lain bermuatan politis, yaitu karena kepala sekolah bukan bagian dari kepemimpinan di wilayah itu.

Sanksi bagi Pemda yang melanggar, sesuai Kepmendikbud Nomor 371 Tahun 2021, adalah, pertama, daerahnya tidak dapat diikutsertakan dalam seleksi PSP untuk bentuk satuan pendidikan yang dilanggar selama satu tahun berikutnya. Sementara itu, satuan pendidikan yang melanggar diberi sanksi berupa penarikan buku teks untuk pembelajaran paradigma baru dan pengembalian Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP)/BOS Kinerja yang telah diterima oleh satuan pendidikan kepada Pemerintah Pusat.

Perubahan Kepala SP tentu mengganggu proses transformasi di sekolah

itu. Maka, sekolah yang mengalami pergantian harus dipantau khusus untuk memastikan PSP berjalan lancar.

"Pemantauan dilakukan melalui UPT menggunakan instrumen PSP. Komitmen Pemda perlu diadvokasi oleh UPT terus-menerus. Level komitmen Pemda perlu di-*upgrade* terus," ungkap Katman.

Agar UPT optimal menjalankan perannya, dilakukan penguatan UPT darisisi kepemimpinan dan kompetensi. Dengan begitu, mereka mampu melakukan advokasi dan berperan konsultatif kepada Pemda untuk mengantisipasi perubahan KS.

A large, thick pink rectangular frame is centered on the page. It is open on the left side, with the top and bottom horizontal lines extending slightly beyond the vertical lines.

BAGIAN VI

REFLEKSI

**PERJALANAN TRANSFORMASI PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK
ANGKATAN KESATU TAHUN PERTAMA**

REFLEKSI

VI



Gambar 56. Dr. Iwan Syahril, Ph.D.

DALAM setiap pertemuan, Iwan Syahril, Direktur Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen senantiasa menyampaikan tentang tujuan Merdeka Belajar. “Tujuan Merdeka belajar ada tiga. Pertama siswa, kedua siswa dan ketiga adalah siswa,” ujar Iwan Syahril, saat memberikan arahan kepada peserta Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program inovasi dan trans-

formasi Pembelajaran (Refleksi Program PSP, IKM, dan PBD) Regional II di Hotel Novotel Makassar Grand Shayla, Senin, 21 November 2022.

Pernyataan Iwan Syahril tersebut selaras dengan tujuan utama Merdeka Belajar yang termaktub dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemendikbud Tahun 2020- 2024, Lampiran I, yaitu menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat (siswa/pelajar) Indonesia.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa PSP yang notabene merupakan episode ketujuh dari Merdeka Belajar, bertujuan menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua siswa di seluruh satuan pendidikan Indonesia. Cita-cita ini dilaksanakan secara bertahap pada sejumlah sasaran sekolah. Tahap pertama adalah 2.500 sekolah, tahap kedua 10.000 sekolah, tahap ketiga 15.000 sekolah, tahap keempat 40.000 sekolah, dan tahap

selanjutnya adalah pengimbasan yang dilakukan oleh 40.000 sekolah tersebut kepada sekolah-sekolah di sekitarnya. PSP ini dilakukan secara integratif dengan ekosistem pendidikan hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi sekolah penggerak.



Gambar 57. Ilustrasi tahapan Sekolah Penggerak

Cita-cita di atas dilaksanakan dengan diawali penguatan SDM sekolah—dalam hal ini adalah kepala sekolah¹ dan guru—yang mampu membumikan konsep *Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani*.² Dengan demikian, kepala sekolah dan para guru diyakini dapat memotivasi para murid agar sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila yang (1) beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, (2) berkebinekaan global, (3) mandiri, (4) gotong royong, (5) bernalar kritis, dan (6) kreatif.

Melihat hal tersebut, Kemendikbudristek telah mencantumkan penguatan SDM sekolah dalam salah satu intervensi PSP, selain pendampingan konsultatif

dan asimetris, pembelajaran dengan paradigma baru, perencanaan berbasis data, dan digitalisasi sekolah.

Pada perkembangannya, kelima intervensi itu dinilai cukup efektif dalam keberhasilan pelaksanaan PSP. Hal ini seperti disampaikan beberapa peserta Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program Inovasi dan Transformasi Pembelajaran (Refleksi Program PSP, IKM, dan PBD).

“Kelima intervensi itu sangat mendukung Pemda dalam implementasi PSP,” ujar Maria Sri Rahayuningsih atau yang akrab disapa Ningsih, dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rote Ndao, Selasa, 22 November 2022.

Senada dengan Ningsih, beberapa kepala sekolah yang mengikuti PSP juga mengaku terbantu oleh kelima intervensi tersebut. Salah satunya adalah Tihabsah, Kepala Sekolah SD Negeri 26 Banda Aceh, yang mengatakan bahwa sekolahnya telah memperoleh peningkatan kapasitas SDM, yang diwujudkan melalui pendampingan konsultatif dan asimetris dari pelatih ahli/fasilitator dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru agar dapat memenuhi standar kualitas yang baik. “Melalui pendampingan dan pelatihan dari Pak Mukhlis (fasilitator) ini kami tercerahkan,” ujar Tihabsah di ruang kerjanya, Kamis, 27 Oktober 2022.

Namun demikian, PSP yang telah berjalan setahun lebih ini, ternyata masih menyisakan miskonsepsi. Hal ini disampaikan Wahyudi, Anggota PDM 01 PSP. “Masih ada asumsi bahwa PSP mendorong perubahan pembelajaran berbasiskan IT. Nah ini perlu diklarifikasi,” ujar Wahyudi dalam pertemuan puncak Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program Inovasi dan Transformasi Pembelajaran (Refleksi Program PSP, IKM, dan PBD) Regional II di Hotel Novotel Makassar Grand Shayla, Rabu, 23 November 2022.

Menurut Wahyudi, PSP mendorong pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yaitu pembelajaran yang memerhatikan minat, bakat, dan aspirasi peserta didik untuk menuju Profil Pelajar Pancasila. PSP mendorong satuan pendidikan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi selama selaras dengan prinsip tersebut. "Namun demikian, bukan berarti satuan pendidikan yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi tidak dapat bertransformasi mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik," tegas Wahyudi.

Selain yang disampaikan Wahyudi, ada beberapa miskonsepsi PSP lain yang muncul dalam Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program Inovasi dan Transformasi Pembelajaran (Refleksi Program PSP, IKM, dan PBD), baik pada Regional I di Banten, Regional II di Sulawesi Selatan, dan Regional III di D.I. Yogyakarta, sebagaimana tabel di bawah ini:

Seleksi Program Sekolah Penggerak

*Miskonsepsi**Klarifikasi*

Penentuan pelaksana PSP berdasar kualitas guru dan sarpras

Seleksi PSP berdasarkan kompetensi kepala sekolah terutama hal kepemimpinan pembelajaran.

Seleksi dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu seleksi administrasi, penulisan esai, simulasi mengajar, dan wawancara yang diikuti dengan pleno daerah.

Pemerintah daerah tidak dilibatkan dalam seleksi PSP

Dinas Pendidikan memberikan rekomendasi ketika kepala satuan pendidikan mengikuti seleksi PSP.

Seleksi PSP angkatan III menggunakan metode sampling acak

🌐 Pemeringkatan calon kepala sekolah pelaksana PSP dilakukan bersama antara dinas pendidikan dan Kemendikbudristek saat pleno daerah. Dalam pleno daerah tersebut, dinas pendidikan dapat menambahkan maksimal 3 indikator dan bobot penilaian sesuai konteks masing-masing daerah.

🌐 Seleksi PSP angkatan III dilakukan dengan metode yang sama dengan seleksi PSP angkatan sebelumnya. Cadangan PSP angkatan ke-1 dan ke-2 diprioritaskan sebagai pelaksana PSP angkatan III.

Peran Pemerintah Daerah/Dinas

Miskonsepsi

Klarifikasi

Dinas pendidikan tidak terlibat dalam implementasi PSP di daerah

- (1) Dinas pendidikan terlibat dalam monitoring melalui PMO tingkat daerah yang dilakukan setiap bulan; dan
- (2) Pengawas sekolah terlibat dalam Pelatihan Komite Pembelajaran Lokakarya, dan Forum Pemangku Kepentingan.

Belum ada regulasi yang jelas terkait pembagian peran Pemda dalam mendukung anggaran

- (1) Setiap daerah telah menandatangani MoU antara Kemendikbudristek dan Kepala Daerah; dan
- (2) Telah ada SPM dalam konteks peningkatan mutu layanan pendidikan dan akun belanja yang disiapkan oleh Kemendagri.

Pergantian kepala sekolah menjadi kewenangan daerah tidak selaras dengan pembatasan mutasi pada satuan PSP

- (1) Komitmen untuk tidak melakukan mutasi kepala sekolah pelaksana PSP telah disepakati dalam MoU antara Kepala Daerah dan Mendikbudristek. Semangat komitmen bersama ini agar transformasi pembelajaran berlangsung secara berkelanjutan.

Intervensi PSP

Miskonsepsi

Tidak ada dukungan
penganggaran dari Pusat
untuk PSP 1 untuk tahun
ketiga

Intervensi utama PSP
adalah penyediaan
sarpras

Dana BOSKIN
digunakan untuk
pengadaan laptop

Klarifikasi

BOSKIN dialokasikan kepada pelaksana PSP untuk tahun I (100%), tahun II (50%), dan tahun III (25%). Pada tahun IV, PSP dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah.

Intervensi utama PSP terdiri dari 5 aspek yaitu: Pendampingan konsultatif dan asimetris, penguatan SDM, pembelajaran dengan paradigma baru, perencanaan berbasis data, dan digitalisasi sekolah.

Berdasarkan Permendikbud No. 2/2022, penggunaan BOSKIN diprioritaskan untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran selama pelaksanaan PSP

Definisi PSP

Miskonsepsi

Klarifikasi

Bantuan untuk meningkatkan digitalisasi sekolah, bertujuan memperbaiki sistem manajemen sekolah

Bantuan atau 5 intervensi PSP bertujuan untuk mendukung peningkatan atau transformasi pembelajaran yang berada di sekolah.

Muncul karena pergantian menteri sehingga terkesan ganti menteri ganti kebijakan

Perubahan kurikulum mengikuti tuntutan dan perkembangan zaman, di antaranya untuk mengatasi learning loss.

Sama dengan program-program sebelumnya, seperti sekolah model, dll

PSP berbeda dengan program sebelumnya, karena PSP berlaku untuk sekolah dengan berbagai macam kondisi. Program kolaborasi pusat dan daerah yang diawali dengan seleksi kompetensi Kepala Sekolah.

Peran & Keterlibatan Pemda Prov/Kab/Kota

Miskonsepsi

Klarifikasi

Terkesan keterlibatan bersifat langsung ke sekolah (tanpa melalui Pemda)

Pemda dilibatkan dalam proses PSP. Diawali penandatanganan MoU, dilakukan sosialisasi, dan pendampingan PSP melibatkan Pengawas Sekolah.

Dinas tidak dilibatkan pada awal rekrutmen atau seleksi PSP

Dinas Pendidikan dilibatkan

- Dinas Pendidikan memberikan rekomendasi ketika kepala satuan pendidikan mengikuti seleksi PSP.
- Pemeringkatan calon kepala sekolah pelaksana PSP dilakukan bersama antara dinas Pendidikan dan Kemendikbudristek saat pleno daerah.
- Dalam pleno daerah tersebut, dinas pendidikan dapat menambahkan maksimal 3 indikator dan bobot penilaian sesuai konteks masing-masing daerah.

Komitmen kepala daerah pada saat penandatanganan PKS dan testimoni dianggap hanya seremonial saja sehingga pengajuan dukungan anggaran tidak diindahkan.

Pernyataan kepala daerah/MoU dua lembaga memiliki dasar hukum yang kuat. Perumusan anggaran di daerah perlu melibatkan beberapa *stakeholder* (DPRD, Bappeda, Dinas Pendidikan)

Kebijakan atau Regulasi

Miskonsepsi

Klarifikasi

Guru di sekolah PSP harus sarjana, bahkan kalau bisa S-2

Guru PSP tidak harus S2 dan regulasi tentang kepala sekolah mengacu permendikbud no 40 thn 2021 (Penugasan Guru sebagai Kepsek).

Motivasi ikut PSP adalah untuk tidak dimutasi

Mutasi/rotasi Kepsek PSP diatur dalam Kepmendikbud Nomor 371 Tahun 2021

Penetapan sekolah pelaksana PSP hanya berdasarkan kualitas Kepala Sekolah, seharusnya melibatkan semua aspek sekolah seperti sarpras dan jumlah guru

Kepala sekolah sebagai Pemimpin Pembelajaran mampu mentransformasi pembelajaran yang berfokus pada murid.

Anggaran di PSP

Miskonsepsi

Klarifikasi

BOSKIN bisa untuk belanja modal (laptop, AC, dll.)

Berdasarkan Permendikbud No. 2/2022, penggunaan BOSKIN diprioritaskan untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran selama pelaksanaan PSP.

Dinas tidak perlu menambah anggaran khusus untuk PSP, karena sudah mendapatkan BOSKIN

PSP adalah program kolaborasi antara pemerintah daerah dan kemendikbud jadi memungkinkan Pemda untuk menambahkan berupa BOSDA

Dari uraian di atas, dapat diambil benang merah bahwa pelaksanaan PSP masih membutuhkan evaluasi dan klarifikasi terhadap sejumlah miskonsepsi, baik yang berasal dari sekolah maupun Dinas Pendidikan. Optimalisasi PMO³ secara berjenjang barangkali dapat meminimalisir lahirnya sejumlah miskonsepsi tersebut.

A large, thick pink rectangular frame is centered on the page. It is open on the left side, with the top and bottom horizontal bars extending slightly beyond the vertical bars.

LAMPIRAN

PERJALANAN TRANSFORMASI PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK
ANGKATAN KESATU TAHUN PERTAMA

LAMPIRAN

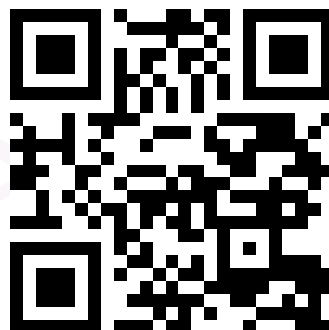
VII

1. Bahan materi berikut ini dapat diunduh melalui tautan:
<http://ringkas.kemdikbud.go.id/bahanpsp1>

NO	BAHAN
1	Naskah Akademik PSP
2	Keputusan Mendikbudristek Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak
3	Daftar Sekolah Pelaksana PSP Angkatan ke-1
4	Templat Nota Kesepakatan PSP antara Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dan Pemda
5	<i>Booklet</i> PSP
6	Paparan Mendikbudristek pada Peluncuran PSP
7	FAQ PSP

2. Video Peluncuran Program Sekolah Penggerak:

<https://ringkas.kemdikbud.go.id/PeluncuranPSP>



3. Laman terkait PSP:

NO	LAMAN	ALAMAT
1	Program Sekolah Penggerak	https://psp-web.pauddikdasmen.kemdikbud.go.id/#/home
2	Dasbor UPT tentang PSP	https://dasbor-upt.pauddikdasmen.kemdikbud.go.id/#login?n=1673339416747

A large, thick pink rectangular frame is positioned in the upper half of the page. It is open on the left side, with the top and bottom horizontal bars extending from the left edge. The text 'CATATAN AKHIR' is placed to the right of the top horizontal bar.

CATATAN AKHIR

PERJALANAN TRANSFORMASI PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK
ANGKATAN KESATU TAHUN PERTAMA

CATATAN AKHIR

VIII

BAGIAN II

1

<https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2021/02/27/kadisd-ikbud-kota-banda-aceh-buka-gema-bsp/>

2

<https://perkim.bandaacehkota.go.id/2021/01/20/wali-kota-tandatangani-mou-program-sekolah-penggerak/>

3

Dalam buku *Refleksi Satu Tahun Program Sekolah Penggerak: Mendorong Transformasi Dua Arah untuk Pendidikan di Indonesia*, yang diterbitkan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP), Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Kemendikbudristek, disebutkan bahwa pihak pemerintah Daerah diwakili oleh Dinas Pendidikan setempat, yang sekurang-kurangnya dihadiri pejabat selevel Kepala Bidang. Peran tim panel dalam Pleno Kelulusan ini adalah untuk mempertimbangkan hasil penilaian Kemendikbudristek dan mengirimkan Berita Acara terkait hasil penilaian pada Sidang Pleno Kelulusan kepada Dirjen GTK.

Ada tiga jenis borang yang perlu dilengkapi oleh Pemda dan UPT, yakni borang peringkat, borang verifikasi, dan berita acara penetapan calon Kepala Sekolah Penggerak. Borang peringkat diisi oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota untuk satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP dan Dinas Pendidikan provinsi untuk satuan pendidikan jenjang SMA dan SLB. Selama penyusunan borang peringkat ini, Pemda akan mempertimbangkan bobot indikator penilaian pada borang peringkat sertaproporsi jumlah sekolah negeri dan swasta. Borang peringkat yang telah disusun oleh Dinas Pendidikan ini kemudian akan diverifikasi oleh UPT. Jika pengisian sudah dilakukan dengan benar, berkas borang peringkat dan borang verifikasi tersebut akan dikirimkan ke Ditjen GTK.

1. MELAKUKAN PENDAMPINGAN KONSULTATIF DAN ASIMETRIS

ADA dua pendekatan yang digunakan Kemendikbudristek dalam dukungan pertama ini, yaitu konsultatif dan asimetris. Pendekatan konsultatif mendorong kemitraan melalui advokasi yang didasarkan pada kesadaran tentang otonomi Pemda dalam konteks desentralisasi pendidikan di Indonesia. Sedangkan pendekatan asimetris adalah pendekatan yang mengutamakan diferensiasi strategi yang didasarkan pada kesadaran tentang ragam karakteristik ekosistem.

"Keterlibatan UPT akan sangat intensif dan asimetris, artinya tidak *onesize fit for all*, tidak seragam jenis dukungan pada masing-masing daerah," tutur Mendikbudristek, saat peluncuran Merdeka Belajar Episode 7: PSP, Senin, 1 Februari 2022 secara virtual.

Pelaksana pendampingan konsultatif dan asimetris adalah UPT Kemendikbudristek yang berada di 34 provinsi Indonesia. Mereka akan melakukan pendampingan terhadap kepala daerah, Dinas Pendidikan, pengawas, dan penilik. Pendampingan di tahap awal difokuskan pada internalisasi PSP yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan di tingkat daerah tentang gagasan dan teknis pelaksanaan program ini.

Selain itu, pendampingan awal ini diharapkan mampu mengadvokasi program dan anggaran yang berorientasi pada penguatan mutu pembelajaran.

2. MEMULAI DENGAN PENGUATAN SDM SEKOLAH

PENGUATAN kapasitas SDM sekolah, terutama kepada kepala sekolah dan guru, merupakan kunci dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, sekaligus melakukan restrukturisasi dan reformasi pendidikan di Indonesia.

Implementasi penguatan SDM sekolah dilaksanakan oleh pelatih ahli yang ditunjuk Kemendikbudristek. Mereka akan melakukan pendampingan secara intensif dalam pelatihan dan pendampingan kepada kepala sekolah, pengawas, penilik, dan guru. Ada 4 komponen utama, yaitu pelatihan komite pembelajaran, *in house training* (IHT), pelatihan mandiri melalui platform merdeka mengajar, komunitas praktisi/komunitas belajar, dan pendampingan oleh fasilitator sekolah penggerak.

Dalam Naskah Akademik PSP yang diterbitkan Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud Tahun 2020, disebutkan bahwa upaya peningkatan SDM ini setidaknya mencakup dua hal penting, yaitu (1) penguatan kapasitas kepala sekolah untuk mewujudkan pengelolaan pembelajaran yang didasarkan pada perencanaan program dan penganggaran yang transparan dan berbasis refleksi diri, dan (2) penguatan kapasitas guru yang sensitif terhadap kebutuhan dan tingkat kemampuan peserta didik, serta senantiasa reflektif dan melakukan perbaikan diri. Dengan demikian, intervensi di tingkat satuan pendidikan idealnya mampu memberdayakan sekolah yang berfokus pada penguatan kapasitas bukan pada penambahan fasilitas.

Sementara itu, terkait dengan pelatihan yang diberikan kepada SDM sekolah ini, Mendikbudristek mengatakan bahwa pelatihan yang dilakukan akan sangat berbeda dari pelatihan-pelatihan sebelumnya. "Pelatihan akan terjadi saat guru sedang mengajar, pada saat melakukan aktivitas di sekolah. Pelatihan akan fokus kepada *clinical training*, yaitu dilakukan pada lingkungan yang sesungguhnya, di

sekolah, dengan murid-murid,” jelasnya.

Mendikbudristek menambahkan, salah satu metode pendampingan akan dilakukan antara kepala sekolah dan guru-guru di sekolah penggerak yang satu ke sekolah lainnya. Karena salah satu cara paling efektif untuk guru dan kepala sekolah melakukan perubahan adalah belajar dari guru dan kepala sekolah lainnya yang sudah melalui transformasi tersebut.

3.

PARADIGMA BARU PEMBELAJARAN MELALUI IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA PEMBELAJARAN

PARADIGMA Baru Pembelajaran Melalui Implementasi Kurikulum Merdeka Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan melalui:

- a. penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
- b. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar peserta didik;
- c. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik; dan
- d. pembelajaran melalui proyek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

KURIKULUM MERDEKA

KURIKULUM yang digunakan pada PSP adalah Kurikulum Merdeka, yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototipe. Kurikulum Merdeka ini dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik.

Dalam Naskah Akademik PSP yang diterbitkan Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud Tahun 2020, disebutkan bahwa ada 3 karakteristik utama kurikulum merdeka, yaitu:

- a. Pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan *soft skills* dan karakter sesuai Profil Pelajar Pancasila;
- b. Fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi; dan
- c. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal.

PROYEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA

PROYEK Penguatan Profil Pelajar Pancasila memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan, mengembangkan keterampilan, serta menguatkan pengembangan enam dimensi Profil Pelajar Pancasila. Melalui proyek ini, peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari secara mendalam tema-tema atau isu penting seperti gaya hidup berkelanjutan, toleransi, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi.

Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila melatih peserta didik untuk melakukan aksi nyata sebagai respons terhadap isu-isu tersebut sesuai dengan perkembangan dan tahapan belajar mereka. Proyek ini juga diharapkan dapat menginspirasi peserta didik untuk memberikan kontribusi dan dampak bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Panduan dan contoh proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila dapat diakses dalam Platform Merdeka Mengajar.

4. PERBAIKAN BERKELANJUTAN DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA

PERENCANAAN Berbasis Data (PBD) adalah bentuk pemanfaatan data rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan pendidikan maupun Dinas Pendidikan (Pemerintah Daerah) terhadap mutu dan capaian pendidikannya. Sementara itu, tujuan PBD adalah untuk memberikan perbaikan pembelanjaan anggaran serta pembenahan sistem pengelolaan satuan pendidikan yang efektif, akuntabel, dan konkret.

Selain itu, Perencanaan Berbasis Data (PBD) juga disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan atau dinas berdasarkan identifikasi masalah yang

berasal dari data pada platform rapor pendidikan, yang kemudian mendorong satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan untuk melakukan pembenahan melalui penyusunan kegiatan peningkatan capaian berdasarkan hasil identifikasi dan refleksi terhadap capaian di rapor pendidikan dan kondisi lapangan.



Ada tiga tahapan dalam perencanaan berbasis data. *Pertama*, mengidentifikasi masalah berdasarkan indikator yang ditampilkan di dalam Rapor Pendidikan. *Kedua*, melakukan refleksi capaian, pemerataan, dan proses pembelajaran di satuan pendidikan masing-masing. *Ketiga*, melakukan pembenahan melalui perumusan kegiatan dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan (BOS dan BOP).

5. ADAPTASI TEKNOLOGI MELALUI DIGITALISASI SEKOLAH

DIGITALISASI sekolah merupakan upaya memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mempermudah proses belajar mengajar. Ada berbagai platform teknologi yang digunakan dan bertujuan mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, dan menambah inspirasi.

Saat ini ada tiga platform teknologi utama yang digunakan dalam PSP, yaitu:

1. Merdeka Mengajar

Platform Merdeka Mengajar adalah platform edukasi yang menjaditeman guru penggerak untuk mewujudkan Pelajar Pancasila. Platform ini bertujuan mendukung guru mengajar lebih baik, meningkatkan kompetensi, dan berkembang secara karier.

Ada tiga keunggulan platform ini, yaitu:

- a. menyediakan referensi bagi guru untuk mengembangkan praktik mengajar sesuai dengan Kurikulum Merdeka;
- b. memberikan kesempatan yang setara bagi guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya; dan
- c. mendorong guru untuk terus berkarya dan menyediakan wadah berbagi praktik baik.

2. Rapor Pendidikan

Rapor pendidikan merupakan laporan spesifik tentang layanan pendidikan PAUD Dikdasmen berdasarkan hasil evaluasi sistem pendidikan. Rapor pendidikan ini menyediakan gambaran dan diagnosis pada sistem pendidikan sebuah sekolah dan gambaran kualitas pendidikan di daerah tertentu

3. Sumber Daya Sekolah

Platform ini melaksanakan proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) secara daring yang dananya bersumber dari dana bantuan pemerintah.

Salah satu platform ini, yakni SIPLah, saat ini telah bertransformasi untuk menyediakan pengalaman berbelanja dan berjualan yang lebih baik. SIPLah memiliki kelebihan sebagai berikut:

- a. Keamanan berbelanja bagi sekolah
 - Alur pembelian dijamin sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - Lebih banyak pilihan mitra pasar dan penyedia
 - Lebih banyak pilihan mitra pengiriman
 - Fitur-fitur yang lebih lengkap, termasuk pembatalan transaksi, aduan, serta *dashboard* pemantauan status transaksi
- b. Kenyamanan berjualan bagi penyedia
 - Proses pendaftaran penyedia dalam 1x24 jam
 - Pengecekan pembayaran otomatis
 - Pembayaran diterima 1x24 jam setelah sekolah membayar

BAGIAN III

1. Wawancara melalui sambungan telepon dengan Sri Suryati Wulandari, Kepala TK Istana Ceria, Kab. Barito Utara, Kalimantan Tengah, melalui sambungan telepon pada Rabu pagi, 14 Desember 2022.
2. Wawancara melalui sambungan telepon dengan Fajar Wahyu Edi, Kepala SDN 8 Banyuasin III, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan, pada Sabtu siang, 10 Desember 2022.
3. Wawancara melalui sambungan telepon dengan Umi Mazro'ah, Kepala SMPN 1 Bringin, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, pada Rabu pagi, 14 Desember 2022, melalui sambungan telepon.
4. Wawancara melalui sambungan telepon dengan Hotnida Hutagaol, Kepala SMA Santa Patricia Kota Tangerang, Banten, pada Rabu siang, 14 Desember 2022.
5. Wawancara melalui sambungan telepon dengan Siti Aisa Ta'nang, Kepala SLB Trikora Indah Bitung, Sulawesi Utara, pada Jumat malam, 23 Desember 2022.

BAGIAN V

Wawancara tatap muka dengan Katman pada Kamis, 29 Desember 2022.

BAGIAN VI

1. Dalam Naskah Akademik Program Sekolah Penggerak disebutkan bahwa Kepala sekolah merupakan elemen penting dalam membenahan tata kelola dan menjadi motor penggerak setiap satuan pendidikan sehingga akan tercipta lingkungan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan melalui membenahan sistem yang mendukung pada peningkatan kualitas pendidikan (Pounder, 2006). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mendefinisikan kepala sekolah sebagai guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin sekolahnya. Dengan demikian, idealnya, kepala sekolah adalah guru yang mampu mengintegrasikan profesionalismenya sebagai guru dan kompetensinya sebagai pemimpin manajerial sekolah untuk mewujudkan visi sekolah, yang berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. (Sheppard, et.al., 2010 dalam UK Essays, 2018) mendefinisikan kepala sekolah sebagai pemimpin yang mampu menciptakan ekosistem guru pembelajar dan menumbuhkan semangat guru sehingga akan mendorong pembelajaran berkualitas.

Peningkatan kapasitas kepala sekolah akan membantu warga sekolah untuk mengeksplorasi permasalahan yang dihadapi dan menyelesaikan masalah mereka sendiri.

Hal ini sejalan dengan konsep transformasi bahwa seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan akan mampu menemukan solusi dan memperbaiki segala permasalahan secara mandiri.

2. Adalah pemikiran Ki Hadjar Dewantara yang mengandung tiga pengertian. *Pertama*, *Ing Ngarso Sung Tulodho* bahwa seorang pemimpin apabila di depan harus bisa memberikan contoh atau menjadi panutan bagi yang dipimpin (warga atau peserta

didik). *Kedua, Ing Madyo Mangun Karso* bahwa seorang pemimpin apabila berada di tengah-tengah masyarakat harus bisa membangkitkan semangat atau memberi motivasi supaya lebih maju, atau lebih baik. *Ketiga, Tut Wuri Handayani*, yakni seorang pemimpin apabila berada di belakang harus bisa mendorong yang dipimpin supaya senantiasa lebih maju.

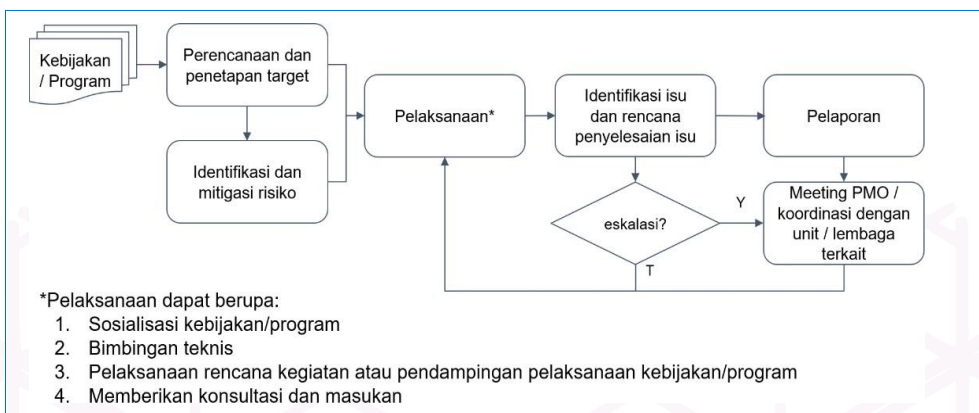
3. *Project Management Office (PMO)*

PROJECT Management Office (PMO) adalah kantor manajemen digital yang berfungsi melakukan standarisasi proses suatu program dan melakukan koordinasi dalam penggunaan bersama sumber daya, metodologi, *Tools*, dan *technique*.

Penggunaan PMO pada PSP dilatarbelakangi oleh *survey* bahwa tingkat keberhasilan sebuah program yang rendah disebabkan oleh praktik buruk dalam mengelola proyek. Sekitar 53% karena faktor kinerja yang buruk, 31% dibatalkan, dan hanya 16% yang berhasil.

Di antara penyebab program gagal adalah organisasi dan manajemen program buruk (36%), tujuan program tidak terdefinisi dengan baik (20%), perencanaan program kurang efektif (15%), SDM kurang mumpuni (10%), masalah *supplier* (4%), masalah teknis 4%, dan faktor lainnya (11%).

Mengingat hal tersebut, Kemendikbudristek melaksanakan PMO pada PSP.

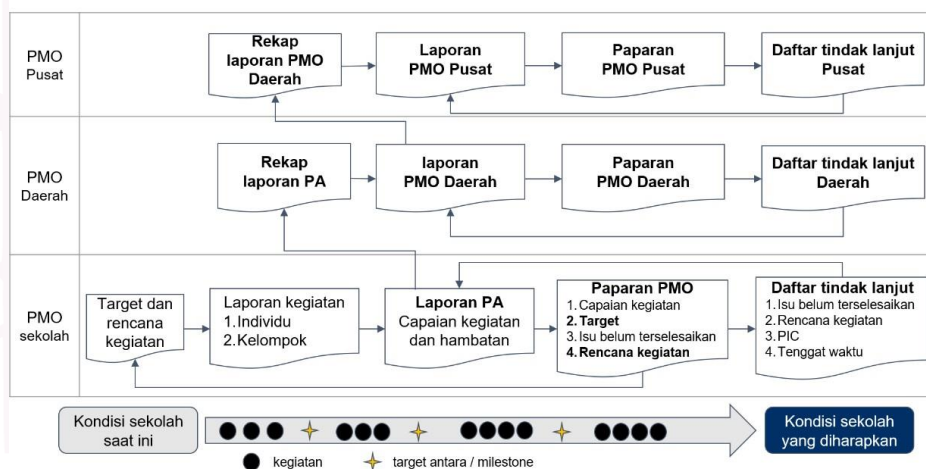


PMO bertujuan sebagai pengendali dan pemantau implementasi PSP, oleh pusat maupun daerah, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Harapannya, rangkaian manajerial PSP mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasinya dapat dijalankan secara lebih disiplin, efektif, dan efisien sesuai aturan, proses, dan metode yang telah ditetapkan.

Lebih jauh, PMO akan memberikan laporan mengenai aktivitas PSP, baik berupa capaian dan/atau identifikasi semua masalah yang ada, dengan melibatkan segenap *stakeholder* di pusat dan di daerah, sehingga akan mempermudah penetapan langkah-langkah mitigasi risikonya. Hal ini sebagaimana diakui Muhammad Husni, Koordinator PMO dari Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng. Menurutnya, melalui PMO dapat diketahui permasalahan PSP di lapangan. "Sekaligus dicarikan solusinya," ujarnya dalam Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program Inovasi dan Transformasi Pembelajaran (Refleksi Program PSP, IKM, dan PBD) Regional II di Hotel Novotel Makassar Grand Shayla, Selasa, 22 November 2022.

Efektivitas dan efisiensi PMO adalah melakukan deteksi dini, karena itu Dinas Pendidikan tak segan akan terus melakukan PMO. Ini juga diakui Ningsih dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rote Ndao. “Mengawal dan mendampingi sekolah penggerak, dalam pelaksanaan tugas sebagai PMO level daerah dan memastikan apakah PSP berjalan sesuai prosedur serta membantu mengatasi persoalan yang terjadi,” tegasnya.

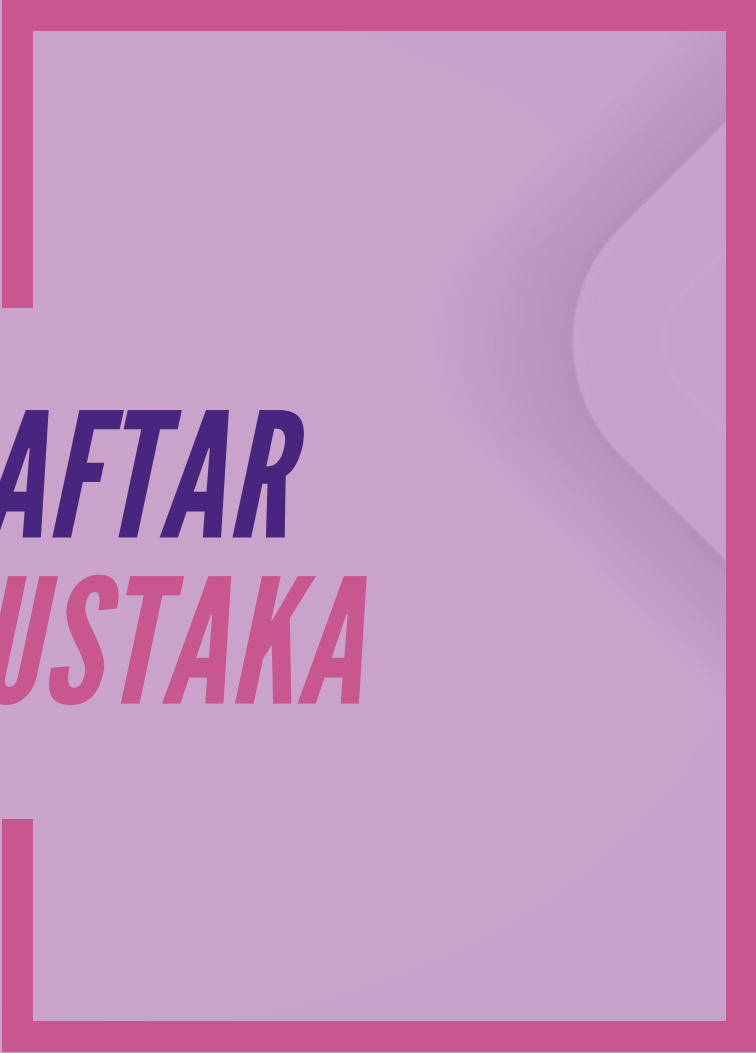
Alur informasi PMO



Pertemuan rutin PMO merupakan salah satu mekanisme koordinasi antar pihak terkait. Dalam berkoordinasi dan bekerja sama mengawal pelaksanaan PSP, setiap pihak membantu mencari solusi atas hambatan yang dialami sekolah penggerak dan melaksanakan penyelesaian hambatan tersebut.

Tim PMO di setiap tingkatan memastikan kegiatan penyelesaian hambatan dilakukan sesuai jadwal yang disepakati. Sementara itu, pelatih ahli secara rutin mengisi laporan secara benar.

Melalui mekanisme PMO tersebut, diharapkan pengelolaan PSP dapat dijalankan secara efektif dan efisien.

A large, thick pink rectangular frame is centered on the page. It is open on the left side, with the top and bottom horizontal lines extending slightly beyond the vertical lines.

DAFTAR PUSTAKA

PERJALANAN TRANSFORMASI PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK
ANGKATAN KESATU TAHUN PERTAMA

DAFTAR PUSTAKA

- Bao, X., Qu, H., Zhang, R., & Hogan, T. P. 2020. "Literacy Loss in Kindergarten Children during COVID-19 School Closures".
<https://doi.org/10.31235/osf.io/nbv79>
- Beatty, A., Pradhan, M., Suryadarma, D., Tresnatri, F.A., & Dharmawan, G.F. 2020. "Memulihkan Penurunan Kemampuan Siswa Saat Sekolah di Indonesia Dibuka Kembali: Pedoman bagi Pembuat Kebijakan".
<https://rise.smeru.or.id/id/publikasi/memulihkan-penurunankemampuan-siswa-saat-sekolah-di-indonesia-dibuka-kembali-pedomanbagi>
- Cerelia, J.J., Sitepu, A.A., Azhar, F., Pratiwi, I.R., Almadevi, M., Farras, M.N., Azzahra, T.S., Toharudin, T. 2021. "*Learning Loss* Akibat Pembelajaran Jarak Jauh Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia". Seminar Nasional Statistika X. Departemen Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran.
<http://prosiding.statistics.unpad.ac.id>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. *Naskah Akademik Program Sekolah Penggerak*. Jakarta: Puslitjak, Balitbang.
- Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan. 2022. *Refleksi Satu Tahun Program Sekolah Penggerak: Mendorong Transformasi Dua Arah untuk Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Kemendikbudristek.

Yarrow, N.C., Masood, E., & Afkar, R . *Estimates of COVID-19 Impacts on Learning and Earning in Indonesia : How to Turn the Tide : Main Report (English)*. Washington, D.C.: World Bank Group.

<http://documents.worldbank.org/curated/en/184651597383628008/Main-Report>

Regulasi

1. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 6555/C/Hk.00/2021 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

**PERJALANAN TRANSFORMASI PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK
ANGKATAN KESATU TAHUN PERTAMA
TAHUN 2023**